

KRISIS UKRAINA DAN DAMPAKNYA TERHADAP TATANAN POLITIK GLOBAL DAN REGIONAL

UKRAINE'S CRISIS AND ITS IMPACT TOWARDS GLOBAL AND REGIONAL POLITICAL SYSTEM

Frassminggi Kamasa¹

Staf Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri RI

Jalan Pejambon No. 6, Jakarta Pusat, 10110

E-mail: frassminggi@mail.ru

Diterima: 20 Februari 2014; direvisi: 25 Mei 2014; disetujui: 25 Juni 2014

Abstract

Political crisis in Ukraine is a recent international issue. This article is going to discuss Ukraine's crisis and its impact towards global and regional political system. Its focus is on analyzing macro and micro actors, issues, and conflict dimensions in Ukraine's political crisis. Different from other articles, this article reviews that the Ukrainian crisis demonstrated a new strategic environment in Europe and an effort to maintain global system from an anti-systemic threat. In addition, this article also discusses whether right to self-determination in form of referendum can be used or not to solve the crisis in Ukraine whereas in other hand, the state sovereignty is an important thing to be held. Furthermore, this article explains the lessons point for Indonesia from Krimea referendum. Lastly, this article finds that the result of Ukraine's crisis not only gives the impact to Ukraine's future but also as the starting point to the parity towards global and regional political system. The implication from what has been mentioned above is whether the West and Russia restraint to interfere or vice versa.

Keywords : *Ukraine's crisis, global and regional political system, geopolitics, international society/system, referendum, right to self-determination.*

Abstrak

Krisis politik di Ukraina adalah isu internasional aktual yang terjadi saat ini. Artikel ini akan membahas krisis Ukraina dan dampaknya terhadap tatanan politik global dan regional. Secara khusus, artikel ini akan fokus menganalisa secara makro dan mikro aktor, isu, dan dimensi konflik krisis politik di Ukraina. Berbeda dengan studi lainnya, artikel ini membahas bahwa krisis Ukraina membawa pada suatu perubahan lingkungan strategis yang baru di Eropa dan usaha untuk mempertahankan tatanan global yang ada saat ini dari ancaman antisistemik. Sebagai tambahan, artikel ini akan membahas sejauh mana hak untuk menentukan nasib sendiri berupa referendum dapat digunakan untuk menyelesaikan krisis, sementara di sisi lain kedaulatan negara merupakan hal yang penting yang harus dijaga. Selanjutnya artikel ini juga membahas pelajaran referendum Krimea bagi Indonesia. Terakhir, artikel ini menemukan bahwa hasil krisis Ukraina tidak hanya berpengaruh bagi masa depan Ukraina tetapi juga awal/dasar pada pertimbangan baru dalam tatanan politik global dan regional. Implikasinya, hal itu menimbulkan dua kemungkinan apakah Barat dan Rusia menahan diri untuk tidak saling mengganggu atau sebaliknya.

Kata Kunci: krisis Ukraina, tatanan politik global dan regional, geopolitik, sistem/masyarakat internasional, referendum, hak untuk menentukan nasib sendiri.

¹ Artikel ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan posisi institusi di mana penulis bekerja (*this article only represents the author's personal opinions*).

Pendahuluan

Ukraina saat ini sedang berada dalam keadaan transisi, keadaan yang membingungkan baik bagi rakyat Ukraina yang pro-Barat, yang pro-Rusia, maupun yang netral. Mau dibawa ke mana rakyat Ukraina dengan perubahan politik yang terjadi saat ini?. Rakyat Ukraina yang pro-Barat mempercayai bahwa ‘takdir’ Ukraina adalah dengan Barat dan untuk itu seharusnya Ukraina bergabung total dalam hal aliansi politik, ekonomi, dan militer dengan negara-negara Barat yang umumnya tergabung dalam Uni Eropa (UE), Amerika Serikat (AS), dan Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Rakyat Ukraina yang pro-Rusia berbeda. Mereka memiliki pandangan bahwa Ukraina adalah bagian dari Rusia karena ikatan agama, persaudaraan, dan historis. Rakyat Ukraina yang pertengahan ingin agar Ukraina memiliki hubungan baik dengan Barat dan Rusia dalam keadaan yang sejajar dan saling menguntungkan.

Dengan krisis yang terjadi hingga saat ini, akankah rakyat Ukraina dapat bersatu padu untuk melawan kekuatan-kekuatan yang memecah belah mereka menjadi seperti sekarang?. Krisis politik di Ukraina adalah cerminan realitas hubungan internasional saat ini. Artikel ini berupaya untuk memahami cermin itu dan arah pergerakan sejarah saat ini untuk dapat menembus realitas yang ada. Artikel ini akan menyajikan dimensi geopolitik dan sistem/masyarakat internasional dalam krisis politik di Ukraina dan dampaknya terhadap tatanan politik global dan regional.

Pertanyaan dari artikel ini adalah: bagaimana krisis politik di Ukraina terjadi dan apa dampaknya terhadap tatanan politik global dan regional?. Apakah krisis politik di Ukraina yang pada realitasnya adalah ‘revolusi berwarna’,²

² Istilah revolusi berwarna diasosiasikan dari rangkaian gerakan politik di tahun 1990-an dan 2000-an yang terjadi di beberapa negara Eropa Timur dan eks Republik Soviet. Revolusi berwarna dikenal juga sebagai perang proksi atau perang asimetris. Gerakan ini menggunakan ciri/label sebuah benda atau mengenakan tanda/symbol khas yang berwarna, seperti misalnya pita oranye yang digunakan di Ukraina tahun 2004. Gerakan ini bercirikan timbulnya kebangkitan (*uprisings*) masyarakat luas secara damai maupun dengan kekerasan untuk menjatuhkan rezim anti-sistemik yang berkuasa dan menggantikannya dengan rezim yang seolah-olah populis dan pro-demokrasi. Di permukaan, hal itu tampaknya merupakan kejadian atau gerakan politik yang asli. Realitasnya, hal itu

seperti yang terjadi di beberapa negara Arab, Asia, dan Amerika Latin, menjadi sebuah program masyarakat/sistem internasional yang harus terjadi untuk menyongsong kedatangan satu tatanan global yang baru?. Dapatkah suatu masyarakat internasional membatalkan produk kebijakan yang ditempuh secara demokratis oleh suatu negara?. Andaikan atas tekanan dan bantuan AS, Rusia, NATO, dan UE Pemerintah Ukraina harus bergabung dengan UE, NATO atau Rusia, apakah AS, Rusia, NATO, dan UE bertanggung jawab atas kerusuhan sosial dan politik yang timbul akibat kebijakan tersebut?. Sejauh mana hak untuk menentukan nasib sendiri berupa referendum dapat digunakan untuk menyelesaikan krisis sementara di sisi lain kedaulatan negara merupakan hal penting yang harus dijaga?.

Pertanyaan-pertanyaan di atas sesungguhnya menggugat urgensi demokrasi dalam tatanan politik dan ekonomi global saat ini. Adalah suatu ironi besar tatkala apa yang dipercaya sebagai prinsip-prinsip liberal yang dianut oleh masyarakat internasional dan mendominasi diskursus politik dan ekonomi internasional justru menghasilkan dan melestarikan sistem dan rezim yang tidak demokratis, seperti yang terlihat dalam revolusi Maidan di Ukraina. Hal itu karena terdapat pertarungan geostrategi antara kekuatan-kekuatan besar dunia (*major powers*) di Ukraina yang dimungkinkan dengan adanya berbagai permasalahan di dalam dan di luar Ukraina.

Pertarungan geostrategi antar *major powers* di Ukraina sebenarnya dimulai di luar Ukraina

adalah revolusi di suatu negara yang didalangi oleh pihak asing atau negara lain di mana revolusi itu tampak dilakukan oleh rakyat di negara itu sendiri. Teknik ini diperkenalkan oleh RAND Corporations, lembaga *think-tank* militer strategis berpengaruh AS, sebagai *swarming* (berkerumun) karena massa terlihat terpecah tetapi sesungguhnya saling terhubung satu sama lain, seperti *swarm of bees* (segerombolan lebah). Teknik ini lahir sebagai strategi promosi demokrasi yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah yang melawan hegemoni Judeo-Anglo-American. Lihat di John Arquilla & David Ronfeldt, *Swarming & The Future of Conflict*, (California: RAND, 2000), hlm. 2-7, 43-55; John Arquilla & David Ronfeldt, *Cyberwar is Coming!*, (California: RAND, 1993), hlm. 23; Bureau of Political-Military Affairs, *U.S. Government Counterinsurgency Guide*, (Washington: Bureau of Political Military Affairs, 2009), hlm. 7; F. William Engdahl, *Full Spectrum of Dominance*, (Wiesbaden: edition.engdahl, 2009), hlm. 31.

sejak AS, NATO, dan UE mendorong perubahan rezim melalui revolusi berwarna di Georgia, Azerbaijan, dan beberapa negara di kawasan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS).³ Sebagai eks wilayah Uni Soviet, Rusia memandang kawasan Asia Tengah dan Kaukasus sebagai *strategic objective* dan inti dari kebijakan luar negerinya.⁴

Dalam rangka memaparkan subjek dimensi geopolitik dalam krisis politik di Ukraina dan dampaknya terhadap tatanan politik-ekonomi global dan regional sekaligus menjawab beberapa pertanyaan tersebut di atas, artikel ini akan menggunakan teori geopolitik dan sistem/masyarakat internasional.

Konsep I: Geopolitik

Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara.⁵ Konsep geopolitik juga menjelaskan permasalahan strategis dalam konteks pertarungan kekuatan (*struggle for power*) dalam struktur sistem internasional.

Geopolitik kekinian berupaya meningkatkan pemahaman sifat holistik dan dinamis proses geopolitik di mana pola ruang tidak lagi dibatasi dalam batas nasional tetapi juga strategi yang mengikutinya di bidang politik, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Geostrategi merupakan cabang dari geopolitik yang berurusan dengan strategi. Geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya serta mempertimbangkan kondisi budaya, penduduk, Sumber Daya Alam (SDA), lingkungan regional maupun internasional.

Sistem dunia yang makin rumit dan terbuka mengakibatkan lingkungan pengaruh (*sphere*

of influence) yang tumpah tindih, pengaruh hegemoni yang tidak sama, hierarki yang bervariasi, adanya interaksi antara komponen (internal) nasional dan pengaruh transnasional, interdependensi, dan *self-containment*. Di sini negara di kawasan memainkan peran yang berbeda menurut interaksi ruang dan ekonomi dengan *major powers* dan tetangganya.

Sistem geopolitik terdiri dari (kategori) ruang yang strukturnya hierarkis, yaitu lingkup geostrategis maritim dan kontinental. Lingkup merupakan arena tempat dan gerakan strategis. Di bawah lingkup adalah wilayah-wilayah geopolitik. Wilayah dibentuk oleh persentuhan dan interaksi politis, budaya, militer, dan ekonomi. Wilayah tingkat kedua ini merupakan suatu sabuk pemisah (*shatterbelt*) yang menjadi wilayah persaingan kedua lingkup. Dengan kata lain, *shatterbelt* adalah kawasan strategis yang secara politis terfragmentasi menjadi wilayah persaingan antara lingkup maritim dan kontinental.⁶

Ukraina sebagai *shatterbelt* atau juga diacu sebagai *crush zone* merupakan wilayah potensi instabilitas dalam pertentangan antara *major powers* yang bertarung di Ukraina saat ini. Dalam definisi operasional, Ukraina sebagai *shatterbelt* adalah kawasan strategis yang secara politis terfragmentasi menjadi wilayah persaingan antara AS, UE dan NATO berhadapan dengan Rusia. Dan masih berlanjutnya konflik di Ukraina timur saat ini menyiratkan adanya tingkat konflik dan fragmentasi yang tinggi di wilayah tersebut.

³ Anthony Cordesman, *Russia and the "Color Revolution"*. (Washington: CSIS), hlm. 13-19, hlm. 25-27; Jeanne Wilson, *Colour Revolutions: The View From Moscow and Beijing*, (Cambridge: Centre for East European Language Based on Area Studies, 2014), hlm. 1-3.

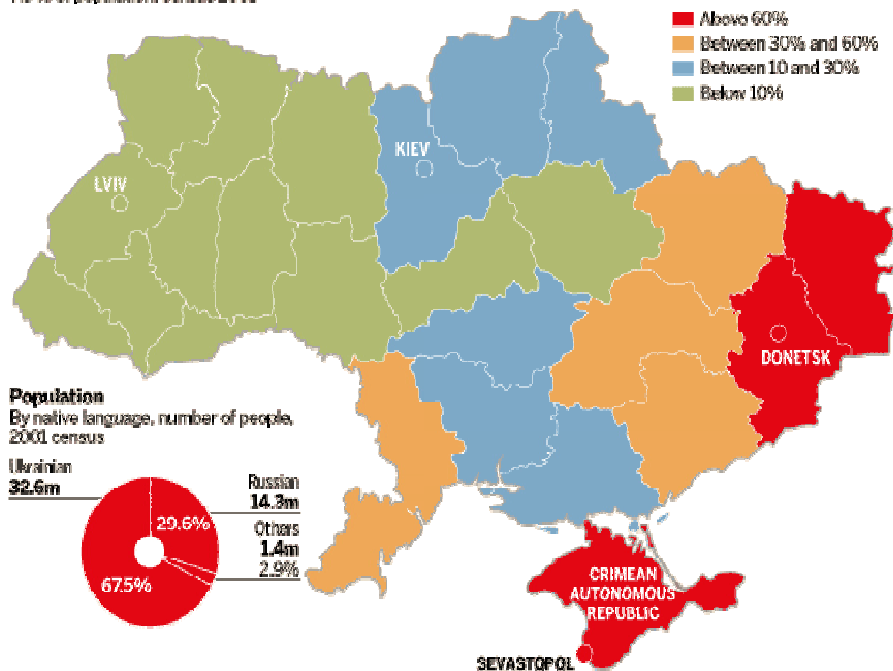
⁴ Vladimir Putin, "Russia in a Changing World: Stable Priorities and New Opportunities", President of Russia Official Web Portal, <http://eng.kremlin.ru/news/4145>, diakses pada tanggal 8 Mei 2014.

⁵ Yulius Hermawan (Ed), *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 185.

⁶ *Ibid.*, hlm. 186.

Ukraine: Russian native speakers

As % of population, census 2001



Sources: ukrcensus.gov.ua; IMF; Thomson Reuters Datastream; IPS

Sumber: http://si.wsj.net/public/resources/images/P1-BP367A_UKRAI_G_20140306181829.jpg, diakses pada tanggal 8 Mei 2014.

Gambar 1. Fragmentasi Barat dan Timur Ukraina (populasi etnik Rusia di Ukraina menurut sensus 2001)

Selain wilayah yang berpotensi mempunyai konflik yang penuh akibat pertentangan antara *major powers*, Ukraina juga merupakan *playing field* yang seimbang dalam kerangka akses pada dua atau lebih kekuatan yang bersaing dan beroperasi dari lingkup geostrategis yang berbeda. Ukraina barat ditempati oleh masyarakat pro-Barat sementara Ukraina timur ditempati oleh masyarakat pro-Rusia seperti terlihat pada Gambar 1. Dalam wilayah yang secara internal terfragmentasi ini, kekuatan besar eksternal (Barat) menjadi suatu *intrusive power*, sementara kekuatan besar regional (Rusia) menjadi kekuatan penyeimbang dalam (hubungan) perimbangan kekuatan.

Konsep II: Sistem/Masyarakat Internasional

Bull mendefinisikan sistem internasional terbentuk “ketika dua atau lebih negara mempunyai kontak yang cukup di antara mereka dan mempu-

nyai dampak yang cukup di antara mereka dalam berbagai keputusan yang menyebabkan mereka berperilaku sebagai bagian dari keseluruhan.”⁷ Dalam pengertian tersebut, Barat adalah sebuah sistem internasional karena terdapat kontak yang cukup di antara mereka yang berdampak satu dengan yang lainnya sehingga menyebabkan mereka berperilaku sistemik sebagai bagian dari keseluruhan. Eksistensi interaksi sistemik yang signifikan antara negara-negara Barat diperlihatkan dalam organisasi regional dan multilateral utama yaitu UE, NATO, Konsensus Washington, dan G7.

Menurut Bull, masyarakat internasional terwujud “ketika kelompok negara-negara, sadar akan beberapa kepentingan-kepentingan bersama dan nilai-nilai bersama, membentuk masyarakat dalam pengertian bahwa mereka sadar untuk terikat dalam seperangkat aturan-aturan bersama

⁷ Hedley Bull, *The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics*, (New York: Columbia University Press, 1977), hlm. 9-10.

dalam hubungan mereka satu dengan yang lainnya dan berbagi dalam mengerjakan institusi-institusi bersama.”⁸ Integrasi dalam kerangka teori demikian kemudian dapat diterjemahkan sebagai kemampuan negara-negara untuk mengakui dan taat pada aturan-aturan umum dalam berinteraksi dan berbagi tanggung jawab demi terlaksananya institusi-institusi yang mereka bangun secara bersama-sama.

Dengan demikian, tindakan Rusia yang menganeksasi Krimea, menurut Barat, atau mereunifikasi Krimea menurut Rusia, merupakan aksi anti-sistemik terhadap sistem/masyarakat internasional. Aksi anti-sistemik adalah reaksi terhadap kekuatan-kekuatan pro-sistemik di bawah hegemoni AS atau reaksi terhadap korupsi, arogansi, dan penindasan yang dilakukan oleh Barat.⁹ Untuk itu, Rusia harus diisolasi, diberikan sanksi, dikeluarkan dari kelompok G8, dan dianggap sebagai musuh bersama kekuatan-kekuatan pro-sistemik.¹⁰ Sementara untuk Ukraina, sistem/masyarakat internasional segera bekerja sama untuk membantu Ukraina keluar dari pengaruh Rusia dengan skema Konsensus Washington.

Konsensus Washington adalah model sistem/masyarakat internasional yang pilar utamanya terdiri dari Bank Dunia, IMF, dan Kementerian Keuangan AS. Menurut Hadar, dalam Konsensus Washington, IMF dan Bank Dunia gencar mempromosikan pengurangan peran pemerintah, mendorong liberalisasi pasar, penghapusan subsidi, dan penjualan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menurut banyak pihak telah turut menjerumuskan perekonomian global ke dalam ketimpangan, yang berujung pada krisis yang sulit diatasi.¹¹

⁸ *Ibid*, hlm. 13.

⁹ Giovanni Arrighi, “Hegemony and Anti-Systemic Movements”, Makalah dalam *International Seminar REGGEN (Global Economic Network and Sustainable Development) 2003, Globalization Constraints and Regionalization Processes*, Rio de Janeiro, 18-22 Agustus 2003, hlm. 1-3.

¹⁰ Robert Burns, “NATO official: Russia now an adversary”, <http://news.yahoo.com/nato-official-russia-now-adversary-150211090--politics.html>, diakses pada tanggal 2 Mei 2014.

¹¹ Ivan Hadar, “Warisan Utang 2014”, *Koran Sindo*, <http://nasional.sindonews.com/read/866412/18/warisan-utang-2014>, diakses pada tanggal 24 Mei 2014.

Untuk mengatasi krisis Ukraina, sistem/masyarakat internasional mengguyur Ukraina dengan pinjaman bersarat tanpa mempertimbangkan akar penyebab krisis dan solusi damai bagi krisis yang masih berlangsung hingga tulisan ini selesai dibuat (pada semester kedua tahun 2014). Menurut Yudiatmaja, “secara teoritik, negara yang stabil pembiayaan pembangunannya sebagian besar bersumber dari sumber daya dalam negeri, bukan dari bantuan asing. Dari perspektif ekonomi, pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada pinjaman atau luar negeri memiliki nilai positif karena tidak membebani masyarakat dengan pajak. Akan tetapi, jika tidak dilakukan dengan hati-hati, bisa menjadi bumerang bagi negara pengutang.”¹² Sebagaimana diketahui bersama, kreditor internasional mempunyai *track record* yang buruk dalam menangani ketimpangan global, termasuk dalam jebakan utang bagi negara-negara berkembang dan miskin.

Per Februari 2014, Ukraina adalah negara termiskin kedua di Eropa dengan utang sebesar \$73 milyar atau sekitar 41,47% dari PDB-nya.¹³ Per Maret 2014, utang Ukraina telah mencapai \$140 milyar dengan hutang sebesar \$16 milyar akan jatuh tempo pada akhir tahun 2015. Di akhir tahun 2014, rasio utang Ukraina terhadap PDB telah mencapai 71,21%, inflasi sebesar 28,5%, mata uang Ukraina susut sebesar 50%, dan ekonominya berkontraksi sebesar 7,5%. Setelah rezim Yanukovich jatuh, kreditor internasional kemudian berdatangan untuk membantu Ukraina. Hingga Juli 2014, komitmen sistem/masyarakat internasional berupa bantuan ekonomi terhadap Ukraina datang dari IMF sebesar \$18 milyar, UE sebesar \$15 milyar, Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (EBRD) sebesar \$6,9 milyar, Bank Dunia sebesar \$3 milyar, Jepang sebesar \$1,1 milyar, AS sebesar \$1 milyar, dan Kanada sebesar \$220 juta. Dengan bantuan yang berjumlah total sekitar \$72 milyar tersebut maka Ukraina diharapkan dapat membangkitkan

¹² Wahyu Eko Yudiatmaja, “Jebakan Utang Luar Negeri Bagi Beban Perekonomian dan Pembangunan Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol. 3, No.1, Januari-Juni 2012, hlm. 453.

¹³ Nidhi Sinha, “Ukraine seeks way between EU and Russia”, <http://www.globaltimes.cn/content/842988.shtml>, diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

ekonominya. Tetapi banyak studi menemukan bahwa utang dalam sistem ekonomi kapitalis pasar saat ini menyebabkan ketidakmandirian, hilangnya kemerdekaan, dan memperdalam krisis yang ada.¹⁴

Analisa Makro

Sebagaimana diketahui pascaruntuhnya Komunisme di Eropa Tengah dan Timur (ETT) serta likuidasi Uni Soviet di tahun 1990 maka kawasan ETT dan eks-Republik Soviet mengalami transformasi menuju demokrasi liberal. Banyak negara yang mengalami transformasi secara cepat, banyak yang lambat, dan ada yang harus ditekan sedemikian rupa untuk menempuh transformasi (demokratisasi) tersebut.

Dalam studi kajian wilayah ETT kontemporer, isu Ukraina, Kosovo, demokratisasi dan perluasan UE serta NATO merupakan isu kontemporer yang menonjol. Selain itu, pergolakan etnonasionalisme pascalikuidasi Soviet dan terpecahnya dua kubu (pro-Barat dan pro-Rusia) di dalam Negara-negara Persemakmuran Independen (CIS), dan negara-negara eks-Pakta Warsawa merupakan isu kontemporer yang juga mengemuka.

Perluasan tandem UE-NATO dan intervensi Konsensus Washington ke ETT dapat dipahami sebagai sebuah program transformasi untuk menyongsong kedatangan satu tatanan global yang baru.¹⁵ Sebuah tatanan global yang baru karena transformasi tersebut sebagian mencerminkan realisasi dari impian supranasionalisme dan dari sini kemudian UE dan NATO, sebagai sebuah komunitas nilai lahir. Sebagian lain mencerminkan dijunjungnya prinsip globalisme tebal yang mengaburkan batas kedaulatan suatu negara. Keduanya bersumber pada dominasi sistem/masyarakat internasional Trans-Atlantik

¹⁴ Frassminggi Kamasa, "Global Governance in a Globalizing World: Do Globalization and Global Governance Erode National Sovereignty?", *Opinio Juris*, Vol. 14, 2014, hlm. 71; Jeffrey Frieden, *Global Capitalism: Its Falls and Rise in the Twentieth Century*, (New York: W.W Norton & Company, 2006), hlm. 469; John Perkins, *Hoodwinked*, (New York: Broadway Books, 2009), hlm. 101, 134; John Perkins, *Confessions of an Economic Hit Man*, (San Fransisco: Berrett-Koehler, 2004), hlm. 35.

¹⁵ Pavel Kubicek, "The European Union and democratization in Ukraine", *Communist and Post-Communist Studies* 38, 2005, hlm. 272-274.

(Barat atau lebih tepatnya aliansi Judeo-Anglo-America) saat ini dalam struktur unipolar dengan kemampuan strategis ekonomi dan militer yang dapat diproyeksikan ke seluruh dunia.¹⁶ Jika memang demikian siapa yang ingin memerintah dunia sebagai pemimpin dari satu pemerintahan global tersebut?.

Adalah hal misterius, membingungkan, dan sulit untuk dijelaskan secara rasional mengenai hubungan antara Inggris dan AS, Inggris dengan Israel, dan AS dengan Israel. Ketiganya merupakan aktor (negara) utama yang menggerakkan sistem/masyarakat internasional saat ini. Inggris membina AS dan Israel, AS kemudian menggantikan Inggris dalam menjadi negara adikuasa, lalu AS membantu dan mengamankan Israel tanpa *reserve* untuk menjadi negara adikuasa dan kini Israel bersiap menggantikan AS sebagai negara adikuasa.¹⁷ Persis seperti Pax Americana menggantikan Pax Britanica, kini tampaknya Pax Judaica hendak menggantikan Pax Americana. Menurut teori transisi kekuasaan dari A.F.K. Organski, Pax Judaica merupakan salah satu kandidat kuat pengganti Pax Americana.¹⁸ Hal itu karena Israel mempunyai ekonomi yang kuat, keunggulan teknologi, kekuatan militer, dan hubungan yang kuat dengan AS.¹⁹

Tetapi sebelum hal itu terwujud terdapat ancaman geopolitik dari Rusia. Rezim Zionis Israel mengetahui bahwa ancaman baginya

¹⁶ Zbigniew Brzezinski, *The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives*, (Washington DC: Basic Books, 1997), hlm. 49; William Engdahl, *Anglo-American Oil Politics and the New World Order*, (London: Pluto Press, 2004), hlm. 135-137; Michel Chossudovsky, *War and Globalisation*, (Global Outlook: Ottawa, 2002), hlm. 117.

¹⁷ John Mearsheimer & Stephen Walt, *Dahsyatnya Lobi Israel*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 31-40.

¹⁸ A.F.K. Organski & Jack Kugler, *The War Ledger*, (Chicago: the University of Chicago Press, 1980), hlm. 23; Ronald L. Tammen, dkk, *Power Transitions: Strategies for the 21st Century*, (New York: Chatham House Publishers, 2000), hlm. 68, 80.

¹⁹ Di tahun 2010, menurut Anthony Cordesman, Israel mempunyai 375-500 alat peledak nuklir canggih. Lihat Anthony Cordesman, dkk, *The Arab Israeli Military Balance, Conventional Realities and Assymetric Challanges*, (Washington: CSIS), hlm. 52; Fareed Zakaria, "Israel has become Mideast superpower," *Toronto Star*, http://www.thestar.com/opinion/editorialopinion/2012/11/22/israel_has_become_mideast_superpower.html, diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

di masa depan akan datang dari Rusia karena Rusia atau Pax Ortodoksica (Kristen Ortodoks) bukanlah bagian dari aliansi Judeo-Anglo-America.²⁰ Oleh karena itu, Krimea, tempat ditambahkannya Armada Laut Hitam Rusia yang bertenaga nuklir berada, tidak boleh jatuh ke tangan Rusia. Hal itu karena Krimea merupakan satu-satunya akses Angkatan Laut (AL) Rusia ke Laut Mediterania. Inilah salah satu alasan mengapa Ukraina, khususnya Krimea yang terletak di Laut Hitam dan mempunyai garis lurus dengan Selat Bosphorus harus dijauhkan dari pengaruh Rusia.

memperbaiki struktur politik-ekonomi global yang timpang, menciptakan tatanan dunia yang multipolar, dan melawan hegemoni AS. Kelima negara ini mempunyai kapasitas ekonomi yang kuat untuk menciptakan alternatif dari sistem moneter petro-dollar.²¹ Dan sejak krisis Ukraina muncul, Rusia terlihat aktif memimpin inisiatif itu. Apabila hal itu berhasil maka konsekuensi logisnya hal itu akan mengancam dominasi Barat atas tatanan politik-ekonomi internasional saat ini. Dengan demikian, provokasi Barat di Ukraina dapat dilihat sebagai cara untuk mempertahankan sistem moneter petro-dollar.



Sumber: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Black_Sea_map.png, diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

Gambar 2. Posisi Strategis Krimea dan Laut Hitam

Sebagai tambahan dari masalah armada laut Rusia di Krimea, terdapat ancaman baru yang datang dari BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan) yang mencoba untuk

²⁰ Manfred Gerstenfeld, "Why Israel should monitor the Ukraine conflict closely" *The Jerusalem Post*. <http://www.jpost.com/Opinion/Op-Ed-Contributors/Why-Israel-should-monitor-the-Ukraine-conflict-closely-352559>, diakses pada tanggal 20 Mei 2014;

²¹ Lucy Westcott, "BRICS Conference Plots a Challenge to Western Economic Domination" *Newsweek*, <http://www.newsweek.com/brics-conference-plots-challenge-western-economic-domination-259093>, diakses pada tanggal 25 September 2014. Sistem moneter petro-dollar intinya adalah suplai minyak hanya dapat dibeli dengan dollar AS. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dibaca pada Frassminggi Kamasa, "Dari Bretton Woods ke Petro-Dollar: Analisis dan Evaluasi Kritis Sistem Moneter Internasional", *Jurnal Global Strategis*, Vol. 8, No. 2, September 2014, hlm. 233-254.

Sementara bagi Rusia, munculnya rezim anti-Rusia di Kyiv membahayakan kepentingan strategisnya di Ukraina, khususnya di Krimea dan Ukraina Timur, kerawanan di sekitar perbatasan, dan ancaman bagi etnis Rusia yang ada di Ukraina. Dan apabila Ukraina bergabung ke UE dan NATO maka itu merupakan ancaman strategis utama bagi ketahanan nasional (eksistensi) Rusia, khususnya kompleks industri militer Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina sebagai faktor penghalau TAHG (tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan) yang mungkin timbul.

Selain tujuan geopolitik dan ekonomi strategis tersebut, Barat juga mempunyai tujuan ekonomi praktis yaitu: memutuskan integrasi Ukraina dengan Uni Pabean Eurasia (*Eurasian Customs Union*) dan Masyarakat Ekonomi Eurasia (*Eurasian Economic Community*); menghambat hubungan komersial Ukraina dengan Rusia selaku mitra dagang utamanya; membuka akses pasar bagi produk Eropa; memperkuat peran Eropa menghadapi diplomasi energi Rusia; dan mendapatkan akses Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) Ukraina.

Tujuan tersebut terwujud, secara eksplisit dan implisit, dalam agenda rezim transisi Kyiv dan pemerintahan pascapemilu 25 Mei 2014. Hal itu membuat Ukraina nampaknya menjadi pelaku sekaligus korban konsekuensi geopolitik Barat dengan Rusia. Dan dengan bergabungnya Krimea dan Kota Sevastopol ke dalam Federasi Rusia, maka tatanan politik global dan regional mengalami perimbangan baru yang hingga tulisan ini selesai dibuat belum jelas arahnya apakah *major powers* tidak saling ganggu atau justru sebaliknya.

Analisa Mikro

Krisis politik di Ukraina berawal ketika Presiden Ukraina Viktor Yanukovych memutuskan untuk tidak menandatangani Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi (PSA) dengan UE di Vilnius, Lithuania, pada 28-29 November 2013. *Incumbent* lebih menerima dana talangan dari Rusia dalam bentuk pembelian obligasi pemerintah Ukraina senilai \$15 milyar serta diskon gas dari Rusia sebesar \$280 per 1.000 m³.

Keputusan tersebut menghasilkan demonstrasi pro-integrasi dengan Eropa di alun-alun (Maidan) Kyiv dan diadakannya pemungutan suara di parlemen Ukraina (Verkhovna Rada) untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai dan menuntut agar Ukraina bergabung dengan UE kemudian menjadi anarkis dan berubah isu menjadi pergantian rezim. Hal itu dipicu oleh diterbitkannya UU Anti Protes dan munculnya kaum radikal Spilna Sprava (Sektor Kanan) yang beraliran fasis dan Partai Svoboda (beraliran neo-Nazi) dalam demonstrasi massa. Bentrokan pecah pada 19 dan 22 Januari yang mengakibatkan 80 orang tewas dan sekitar 700 orang lainnya luka-luka. Selain itu, 108 polisi ditembak, beberapa meninggal, dan 63 dalam keadaan kritis.²²

Kantor Jaksa Agung Ukraina menjelaskan bahwa Berkut (polisi anti huru-hara Ukraina) tidak menembak para demonstran. Kementerian Dalam Negeri Ukraina mengatakan bahwa polisi hanya menggunakan peluru karet untuk membubarkan demonstran dan tidak mengetahui siapa yang menggunakan peluru tajam untuk menembaki demonstran. Barat menuduh Rusia berada dibalik aksi penembakan tersebut sementara Rusia balik menuding bahwa Barat membiayai dan mempersenjatai aktivis Euromaidan yang digunakan sebagai pion untuk menggoyang Ukraina dan menembaki massa. Tindakan penembakan oleh orang tidak dikenal dan adanya indikasi campur tangan *major powers* dalam suasana demikian membuat jelas kompetisi geopolitik antara Barat dengan Rusia di Ukraina adalah pertarungan yang sengit, berdarah, dan panjang.²³

William Engdahl dalam artikelnya di *Global Research*, *Ukraine Protests Carefully Orchestrated: The Role of CANVAS, US-Financed "Color Revolution Training Group*, mengungkap keterlibatan *Center for Applied*

²² RT, "Kiev allows police to use firearms, demands armed rioters lay down weapons", <http://rt.com/news/ukraine-kiev-firearms-weapons-police-934/>, diakses pada tanggal 22 Februari 2014.

²³ Michael Hudson, "The New Cold War's Ukraine Gambit", *Strategic Culture*, <http://www.strategic-culture.org/news/2014/05/21/the-new-cold-war-ukraine-gambit.html>, diakses pada tanggal 23 Mei 2014.

Non-violent Action and Strategies (CANVAS), organisasi yang diciptakan untuk membina oposisi di berbagai negara, dalam memicu krisis politik di Ukraina. CANVAS mendapat pendanaan dari *Freedom House*, *International Republican Institute*, *Institute for Open Society* (George Soros), USAID dan *American Institute for Peace*. CANVAS terlibat dalam mengobarkan revolusi berwarna untuk menggulingkan Slobodan Milosevic di Yugoslavia. CANVAS juga bekerjasama dengan oposisi Venezuela untuk menggulingkan Chavez.²⁴

Pada bulan Desember 2013, Wakil Menteri Luar Negeri AS, Victoria Nuland, mengingatkan para pemimpin bisnis AS untuk membantu Ukraina mencapai aspirasi Eropanya. Ia juga memberitahukan bahwa AS telah menginvestasikan \$5 milyar untuk membantu Ukraina mencapai “masa depan yang layak.”²⁵

Selain itu, tanggal 28 Januari 2014, melalui pembicaraan telepon dengan Dubes AS untuk Ukraina, Geoffrey Pyatt, Nuland berbicara tentang solusi atas Ukraina dengan pemerintahan baru. Dalam percakapan yang juga dipublikasi di *Youtube* itu, Nuland cenderung memilih Arseniy Yatsenyuk sebagai Perdana Menteri (PM) Ukraina baru. Sementara Vitali Klitschko, di mata Nuland, “masih kurang berpengalaman.”²⁶ Tidak hanya itu, salah satu kelompok demonstran di lapangan Maidan, yakni *Ukrainian National Self Defence Organization* (*Ukrainska Narodna Sambooborunu*, UNSO), pernah mendapat

pelatihan militer di kamp teroris NATO di Estonia tahun 2006.²⁷

Lalu, pada 25 Februari 2014, sebuah percakapan telepon antara Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Catherine Aston dengan Menteri Luar Negeri Estonia, Urmas Paet mengungkapkan, bahwa kelompok oposisi bertanggung jawab atas eskalasi kekerasan selama demonstrasi di Kyiv. Menurut Menlu Estonia, seseorang dari kelompok oposisi yang kini memegang kekuasaan di Ukraina berada di balik aksi penembakan terhadap demonstran dan koalisi yang baru tidak ingin menyelidiki hal tersebut.²⁸ Keaslian pembicaraan yang bocor ke media tersebut dibenarkan oleh Pemerintah Estonia.²⁹

Tanggal 28 Februari 2014, *Pando Daily* menurunkan laporan terkait keterlibatan AS, terutama melalui *US Agency for International Development* (USAID) dan *National Endowment for Democracy* (NED), dalam mendanai kelompok oposisi di Ukraina. USAID menyediakan 54% dana Centre UA, sebuah LSM yang aktif berkampanye membongkar korupsi rezim Yanukovich. Situs itu juga menyebut keterlibatan Pierre Omidyar, pengusaha AS pendiri situs lelang *Ebay* dan pemilik *Omidyar Network*, dalam mendanai kaum oposisi Ukraina.³⁰

Pada awal Maret 2014, mantan kepala Dinas Keamanan Ukraina Aleksandr Yakimenko mengungkapkan bahwa para penembak jitu yang menewaskan puluhan orang selama demonstrasi Maidan dioperasikan dari sebuah bangunan yang

²⁴ William Engdahl, “Ukraine Protests Carefully Orchestrated: The Role of CANVAS, US-Financed ‘Color Revolution Training Group’” *Global Research*, <http://www.globalresearch.ca/ukraine-protests-carefully-orchestrated-the-role-of-canvas-us-financed-color-revolution-training-group/5369906>, diakses pada tanggal 8 Januari 2014.

²⁵ “American Conquest by Subversion: Victoria Nuland’s Admits Washington Has Spent \$5 Billion to ‘Subvert Ukraine’”, *Global Research News*, <http://www.globalresearch.ca/american-conquest-by-subversion-victoria-nulands-admits-washington-has-spent-5-billion-to-subvert-ukraine/5367782>, diakses pada tanggal 7 Februari 2014.; “US Providing Ukraine with financial, technical and non-lethal aid before presidential elections-Nuland”, *Interfax-Ukraine*, <http://en.interfax.com.ua/news/general/204163.html>, diakses pada tanggal 12 Mei 2014.

²⁶ Raymond Samuel, “Kegelapan’ Menghantui Ukraina” *Berdikari Online*, <http://www.berdikarionline.com/dunia-bergerak/20140302/kegelapan-menghantui-ukraina.html#ixzz36rMZ59hc>, diakses pada tanggal 2 Maret 2014.

²⁷ Jonathan Marcus, “Ukraine Crisis: Transcript of leaked Nuland-Pyatt Call” *BBC*, <http://www.bbc.com/news/world-europe-26079957>, diakses pada tanggal 8 Februari 2014. Saat dikonfirmasi keaslian rekaman, Asisten Menlu AS mengatakan bahwa itu adalah *tradecraft* yang mengesankan. *Tradecraft* adalah istilah yang kerap dipakai di kalangan mata-mata, terkait pengumpulan data intelijen.

²⁸ Press TV, “Kiev snipers hired by Maidan coalition: Leaked call”, <http://www.presstv.com/detail/2014/03/07/353636/maidan-coalition-hired-kiev-snipers/>, diakses pada tanggal 26 April 2014.

²⁹ John Hall, “Estonian Foreign Ministry confirms authenticity of leaked phone call discussing how Kiev snipers who shot protesters were possibly hired by Ukraine’s new leaders” *Daily Mail*, 27 September 2014.

³⁰ Mark Ames, “Pierre Omidyar co-founded Ukraine revolution groups with US government, document show” *Pando Daily*, <http://pando.com/2014/02/28/pierre-omidyar-co-funded-ukraine-revolution-groups-with-us-government-documents-show/>, diakses pada tanggal 1 Maret 2014.

dikendalikan oleh oposisi dan khususnya oleh komandan Maidan, Andrey Parubiy, yang telah melakukan kontak dengan pasukan khusus AS.³¹ Ia juga mengungkapkan bahwa para penembak jitu bertindak di bawah perintah AS dan Polandia.³²

Dalam suasana yang kritis tersebut, pada 25 Januari 2014, *incumbent* menawarkan jabatan strategis di dalam kabinet kepada kubu oposisi untuk menerapkan perubahan UUD yang akan mengurangi kekuasaan presiden. Proposal ini ditolak oleh para pemimpin oposisi yang kemudian terus melanjutkan demonstrasi hingga agenda yang diklaim sebagai tuntutan rakyat Ukraina terpenuhi, antara lain: Ukraina bergabung dengan UE, memajukan jadwal pilpres, dan pergantian pimpinan nasional (parlemen, presiden, PM, dan Kabinet Menteri). Keadaan berkembang dengan cepat ketika berbagai konsesi yang ditawarkan *incumbent* dalam bentuk pembatalan UU Anti Protes, pengunduran diri PM, dan pengesahan UU pemberian amnesti bagi demonstran yang ditahan, tidak membuat kekacauan menjadi mereda. Bahkan sebaliknya, bentrokan kembali pecah pada 18-19 Februari 2014 yang mengakibatkan 82 orang tewas dan ratusan orang luka-luka.

Untuk mencegah keadaan menjadi semakin memburuk, para pihak yang bertikai kemudian sepakat untuk duduk bersama guna mengakhiri krisis politik berdarah yang terjadi sejak November 2013. Pada 21 Februari 2014, kesepakatan damai tercapai antara *incumbent* dengan oposisi. Namun, kesepakatan ini berumur pendek karena kekerasan kembali pecah ketika kelompok Spilna Sprava dan Partai Svoboda mengambil alih gedung parlemen Ukraina dan berhadapan-hadapan dengan Berkut. Dengan gagalnya kesepakatan 21 Februari tersebut maka proses transisi politik di Ukraina secara damai mengalami jalan buntu.

Keadaan berubah sedemikian cepat ketika parlemen di akhir pekan (22-23 Februari 2014)

³¹ RT, "Kiev Snipers shooting from bldg. controlled by Maidan forces-Ex Ukraine security chief", <http://rt.com/news/ukraine-snipers-security-chief-438/>, diakses pada tanggal 5 April 2014

³² Christopher Harress, "Poland and Lithuania Wary of Kaliningrad Being Base of Next Move From Russia" *International Business Times*, <http://www.ibtimes.com/poland-lithuania-wary-kaliningrad-being-base-next-move-russia-1561963>, diakses pada tanggal 19 Maret 2014.

melakukan sidang istimewa secara maraton untuk membentuk pemerintahan masa transisi termasuk memakzulkan *incumbent*, menunjuk Oleksandr Turchynov sebagai Presiden sementara dan menetapkan pilpres pada 25 Mei 2014 (dari jadwal seharusnya pada 29 Maret 2015). Empat hari kemudian, parlemen menyetujui pilihan Presiden Turchynov atas Arseniy Yatsenyuk sebagai PM sementara dan kemudian juga menyetujui pembentukan kabinet yang menyingkirkan elemen pro-Yanukovych dan menggantinya dengan elemen pro-Barat, radikal dan ultra-nasionalis.

Kekacauan di bidang politik kemudian merembet ke bidang ekonomi. Setelah *incumbent* dimakzulkan, harga diskon gas Rusia sebesar \$280 per 1.000 m³ merangkak naik menjadi \$485 per 1.000 m³. Kenaikan 173% harga gas Rusia merupakan sebuah pukulan berat bagi ekonomi Ukraina. Di tengah upaya pembentukan pemerintahan yang baru di Ukraina untuk mengakhiri krisis politik dan penyelamatan perekonomian Ukraina, nilai mata uang Ukraina Hryvna (Hrv) semakin melemah terhadap mata uang dolar AS yang pada penutupan pasar uang antarbank tanggal 25 Februari 2014 mencapai Hrv 9,68 – 9,78 per 1 dolar AS yang hampir mendekati nilai terendah yang pernah terjadi pada tahun 2008 (\$1,- = Hrv10,-). Selain itu, cadangan devisa Ukraina selama bulan Februari 2014 juga menyusut sekitar \$2,8 milyar dan telah masuk tahapan kritis dengan jumlah sekitar \$15 milyar. Diperkirakan PDB Ukraina di awal tahun 2014 tinggal \$200 milyar. Dan semenjak terjadinya krisis politik di Ukraina (21 November 2013), nilai mata uang Hryvna telah mengalami penurunan sebesar 28%. Di sisi lain, defisit anggaran pada tahun 2013 mencapai 9% dari PDB yang merupakan defisit anggaran tertinggi dibandingkan negara-negara di kawasan.³³

Kekacauan di bidang politik dan merembet di bidang ekonomi tersebut membuat partai pendukung Yanukovych, Partai Region, kemudian

³³ Olga Pogarska & Edilberto Segura, "Ukraine-Economic Situation-April 2014" *Unian Information Agency*, <http://www.unian.info/politics/908836-ukraine-economic-situation-april-2014.html>, diakses pada tanggal 18 April 2014; Kenneth Rapoza, "Ukraine Welcomes IMF Austerity Regime," *Forbes*, <http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2014/03/28/ukraine-welcomes-imf-austerity-regime/>, diakses pada tanggal 29 Maret 2014.

berbalik dengan menjadi oposisi. Sementara itu, Yanukovych yang telah melarikan diri dari Kyiv dan meminta suaka di Rusia mengatakan bahwa ia menolak pemecatannya dan mengatakan bahwa pemerintahannya yang sah terpilih lewat pemilu yang demokratis telah dikudeta. Ia mengatakan lebih lanjut bahwa pemerintahan interim di Kyiv sebagai kelompok fasis yang dibantu oleh Barat.³⁴

Senada dengan Yanukovych, Rusia menyatakan masih menganggap Yanukovych sebagai presiden Ukraina yang sah dan mempertanyakan legitimasi pemerintahan Ukraina yang baru. Meski pada akhirnya Rusia melunak paska terpilihnya Petro Poroshenko sebagai presiden baru Ukraina dalam pilpres 25 Mei 2014.³⁵ Menurut Rusia, pemerintahan interim Ukraina berada di bawah pengaruh para kaum ultra-nasionalis serta fasis yang mengancam keamanan dan eksistensi etnis Rusia di Ukraina dan warga negara Rusia yang tinggal di Ukraina.

Geostrategi Revolusi Berwarna

Baik Barat dan Rusia saling tuding sebagai biang keladi yang menciptakan krisis Ukraina yang merupakan revolusi berwarna jilid II di Ukraina (yang pertama di tahun 2004). Perspektif yang luas dan berimbang penting untuk melihat akar permasalahan krisis politik di Ukraina. Minimal terdapat empat faktor yang terlibat dalam sebuah konflik, yaitu *triggers* (pemicu), *pivotal* (akar), *mobilizing* (peran pemimpin), dan *aggravating* (faktor yang memperburuk situasi krisis/konflik).³⁶ Keempat faktor ini umumnya berjaln berkelindan dalam sebuah krisis/konflik.

³⁴ Kathy Lally, "Ousted Ukraine president warns of civil war, criticizes U.S. for aiding current government" *Washington Post*, http://www.washingtonpost.com/world/ousted-ukraine-president-warns-of-civil-war-criticizes-us-for-aiding-current-government/2014/03/11/13fd0482-a907-11e3-b61e-8051b8b52d06_story.html, diakses pada tanggal 12 Maret 2014. "Yanukovych blames fascists, West for Ukraine Chaos" *The Times of Israel*, <http://www.timesofisrael.com/yanukovych-blames-fascists-west-for-ukraine-chaos/>, diakses pada tanggal 2 Maret 2014.

³⁵ Alexey Lossan, "Putin: Rusia Siap Akui Pemilu Ukraina" *RBTH Indonesia*, http://indonesia.rbthlm.com/politics/2014/05/28/putin_rusia_siap_akui_pemilu_ukraina_23923.html, diakses pada tanggal 31 Mei 2014.

³⁶ Sholihan, "Memahami Konflik," dalam Mukhsin Jamil (Ed), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Semarang: Wali Songo Media Center, 2007), hlm. 5.

Artikel ini melihat pemicu krisis adalah pilihan *incumbent* yang tidak menandatangani PSA dengan UE yang menimbulkan demonstrasi Euromaidan yang dilakukan secara proksi untuk mengganti rezim pro-Rusia dengan rezim anti-Rusia. Akarnya adalah aksi anti-sistemik yang dilakukan Rusia sejak era Putin yang bertentangan dengan masyarakat/sistem internasional. *Mobilizing factor*-nya adalah para pemimpin oposisi yang menggerakkan Euromaidan berkat dukungan Barat. Dan terakhir *aggravating factor*-nya adalah rezim Yanukovych yang korup dan tidak berdaya menghadapi bentrokan berdarah yang dilakukan oleh kelompok ultranasionalis beraliran fasis dan neo-nazi.

Analisa tersebut sejalan dengan strategi dan pendapat di Washington dan Moskwa. Dalam dengar pendapat di Senat AS pada 15 Januari 2014 dibahas perlu adanya kesatuan aksi hingga sanksi bagi Ukraina untuk menghadapi krisis yang berlangsung. Menurut penasehat keamanan nasional AS periode 1977-1981, Zbigniew Brzezinski, Ukraina harus dibebaskan dari pengaruh Rusia dan untuk itu disarankan agar AS berdialog dengan oligarki yang memiliki pengaruh dengan *incumbent* dan tidak ingin didominasi oleh Rusia. Lebih lanjut ia menyampaikan agar aksi Euromaidan dapat dijadikan alat politik yang efektif dan menyarankan untuk membentuk komite nasional dengan tujuan utama bergabung menjadi negara UE.³⁷ Rencana unilateral ini adalah bentuk *thrust* kekuatan utama masyarakat/sistem internasional yang menginginkan agar dengan terjadinya revolusi berwarna ini maka Ukraina akan menjadi negara UE. Apabila tidak, Ukraina akan disanksi dan gelombang revolusi berwarna selanjutnya akan muncul untuk mengganti rezim delinkuen tersebut.

Dalam sebuah memorandum berjudul "Selamatkan Ukraina" yang dipublikasikan tanggal 12 Februari 2014 dalam majalah Rusia, *Zavtra*, dikemukakan bahwa kudeta di Ukraina yang menggunakan metode fasis dan Nazi merupakan strategi Barat untuk mengancam

³⁷ United States Committee on Foreign Relations, "Business Meeting and Implications of the Crisis in Ukraine Hearing", <http://www.foreign.senate.gov/hearings/business-meeting-and-implications-of-the-crisis-in-ukraine-hearing>, diakses pada tanggal 17 Januari 2014.

Federasi Rusia.³⁸ Memorandum itu ditulis oleh kelompok ahli *Izborsk*, kelompok intelektual berpengaruh dalam lingkaran *think-tank* Presiden Rusia. Memorandum itu secara detail juga memprediksi konsekuensi dari pergantian rezim di Kyiv terhadap kepentingan strategis Rusia dan bencana besar bagi masa depan Rusia. Selain itu, memorandum tersebut menyatakan bahwa AS dan UE bertanggung jawab terhadap proyek pergantian rezim di Ukraina. Memorandum itu kemudian merekomendasikan agar Rusia bersama dengan AS untuk berkonsultasi menghindari krisis di bawah Memorandum Budapest atas Kedaulatan Ukraina tahun 1994. Dalam Memorandum tersebut disebutkan bahwa AS, Rusia, Prancis, Inggris, dan Cina menyepakati akan menahan diri untuk menggunakan ancaman terhadap integritas wilayah atau kebebasan politik Ukraina apabila Ukraina melucuti senjata nuklirnya.

Memperebutkan Ukraina

Posisi Ukraina sebagai *shatterbelt* Barat dan Rusia membuat keduanya berusaha untuk memasukkan Ukraina ke dalam lingkup pengaruhnya. Di sisi lain, seperti halnya negara eks-Soviet yang melakukan demokratisasi, setiap rezim yang berkuasa di Kyiv senantiasa dihadapkan pada pilihan untuk bergabung dengan Barat, Rusia, atau netral.

Meskipun banyak yang menganggap Presiden Yanukovych pro-Rusia, namun sesungguhnya ia tidak membiarkan Ukraina berada dalam pengaruh Rusia. Meski dinilai sebagai rezim yang korup dan gagal mengembangkan ekonomi Ukraina, ia kukuh melindungi kepentingan ekonomi dan politik Ukraina yang independen. Ketegasan dan independensi Yanukovych terlihat ketika pemerintahannya memberikan tantangan kepada Rusia dalam hubungan perdagangan kedua negara di 2013. Sepanjang tahun 2013, keinginan Ukraina untuk berintegrasi dengan UE membuat Ukraina mengurangi produk impor Rusia di pasar Ukraina. Hal ini dibalas Rusia dengan perang dagang, hambatan ekspor produk

Ukraina ke Rusia, dan menyetop pasokan gas ke Ukraina sebagai hukuman atas hubungan dekat Ukraina dengan UE.

Di tahun 2013, tekanan Rusia dalam bentuk pengawasan transportasi barang dari Ukraina ke Rusia menyebabkan kerugian bagi Ukraina hingga \$2,5 milyar. Di tengah ancaman Ukraina untuk bergabung dengan UE, Rusia kemudian akhirnya mengambil langkah yang lebih bersahabat dengan memberikan diskon gas kepada Ukraina dari harga biasanya \$410 menjadi \$260 per 1.000 m³. Ukraina menerima hal itu dengan senang hati karena faktor ekonomi yang mendesak.

Hal itu karena dari segi ekonomi, 25% tujuan ekspor Ukraina adalah ke Rusia dan pada tahun 2013, impor gas Ukraina dari Rusia mencapai lebih dari 92%. Perdagangan Ukraina-Rusia di tahun 2013 tumbuh lebih dari 18% dan perdagangan Ukraina dengan negara-negara Uni Pabean meningkat 34% di tahun 2011, 11% di tahun 2012, dan 2-3% di tahun 2013.³⁹ Dengan tumbangnya rezim Yanukovych dan keadaan yang tidak menentu di bidang politik dan ekonomi, maka Ukraina pun semakin terbuka untuk diperebutkan oleh *major powers* untuk mencapai kepentingan masing-masing.

Krimea Melawan Kyiv

Konflik berdarah di Kyiv ternyata tidak usai setelah tergulingnya Yanukovych. Perseteruan kepentingan Barat, Ukraina, dan Rusia menjalar hingga wilayah Krimea dan Ukraina bagian timur yang menuntut diadakannya referendum untuk otonomi yang lebih luas atau bahkan pemisahan diri dari Ukraina. Khusus di Krimea, perseteruan tersebut telah mencapai titik nadir.

Berdasarkan sensus penduduk Ukraina pada 2001, populasi Krimea terdiri dari 2,4 juta jiwa. Menurut catatan Dinas Statistik Ukraina, hingga 1 November 2013, penduduk Republik Otonom Krimea berjumlah 1,9 juta jiwa dengan komposisi lebih dari 50% merupakan orang Rusia, 24% orang Ukraina dan sekitar 12% orang

³⁸ "Russia's 'Save Ukraine' Memorandum: Prevent the Ukraine from Going Fascist," *Global Research News*, <http://www.globalresearch.ca/russias-save-ukraine-memorandum-prevent-the-ukraine-from-going-fascist/5368608>, diakses pada tanggal 15 Februari 2014.

³⁹ Rika Dragneva-Lewers & Katryna Wolczuk, "Russia, the Eurasian Customs Union and the EU: Cooperation, Stagnation or Rivalry?" *National Security & Defence*, 2013, No.4-5, hlm. 108; Information-Analytical Bulletin of the Cabinet of Ministers of Ukraine, "Ukraine wants global free trade", 25 Oktober 2013.

Tatar Krimea. Terkait penggunaan bahasa, hukum Republik Otonom Krimea tidak membahas gagasan bahasa ‘negara’ atau bahasa ‘resmi’ untuk penduduknya. Oleh karena itu, baik bahasa Rusia maupun bahasa Ukraina digunakan sebagai bahasa resmi di Krimea. Menurut survei yang dilakukan oleh Institut Internasional Sosiologi di Kyiv pada 2004, bahasa Rusia digunakan sebagai alat komunikasi oleh 97% penduduk Krimea.

Meski *de jure* adalah daerah otonomi di bawah pemerintahan Ukraina, secara *de facto* Krimea ‘milik’ Rusia. Krimea adalah satu-satunya daerah di Ukraina dengan penduduk keturunan Rusia mencapai sekitar 60%. Selain lokasi, banyaknya warga keturunan Rusia di Krimea disebabkan faktor sejarah. Sebelum 1954, Krimea adalah *oblast* (provinsi) di bawah administrasi Rusia. Namun, pemimpin Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, memberikan Krimea ke Ukraina. Ada dua alasan yang diungkapkan. Pertama, latar belakang Khrushchev yang merupakan etnis Ukraina. Kedua, sebagai ‘hadiah’ perayaan 300 tahun bergabungnya Ukraina ke Rusia.

Selain itu, Krimea juga menjadi lokasi strategis tempat ditambatkannya Armada Laut Hitam Rusia. Militer Rusia masih berada di Sevastopol karena di bawah Traktat Persahabatan, Kerja Sama dan Kemitraan Kyiv-Moskwa tahun 1997, Rusia mengakui status kepemilikan Sevastopol dan kedaulatan Ukraina. Sebagai balasannya, Ukraina memberikan Rusia hak untuk terus menggunakan pelabuhan Sevastopol bagi armada laut Rusia hingga tahun 2017.

Perjanjian awal izin Armada Laut Hitam di Sevastopol berlangsung untuk 20 tahun. Perjanjian ini otomatis diperpanjang lima tahun kecuali salah satu pihak membatalkannya. Perjanjian kedua, ditandatangani di Kharkiv tahun 2010, memperpanjang penggunaan pelabuhan Sevastopol untuk armada Rusia hingga 2042. Rusia membayar Ukraina \$98 juta per tahun untuk menyewa pangkalan laut di Krimea. Selain itu, berdasarkan perjanjian Kharkiv, Rusia akan memberikan potongan harga gas \$100 per ton.



Sumber: http://news.bbcimg.co.uk/media/images/73286000/gif/_73286672_Krimea_black_sea_fleet_624.gif, diakses pada tanggal 20 September 2014

Gambar 3. Krimea dan Kekuatan Armada Laut Hitam Rusia

Rusia menggunakan pelabuhan Sevastopol karena tidak ada pelabuhan di Rusia yang mampu menampung Armada Laut Hitam. Pelabuhan Rusia di Novorossiysk tidak cukup dalam dan kurang infrastrukturnya. Armada Laut Hitam Rusia terdiri dari 388 kapal perang Rusia, termasuk 14 kapal selam diesel. Selain itu, terdapat 161 jet tempur di pangkalan udara yang disewa Rusia di Gvardeyskaya dan Sevastopol. Total terdapat 25.000 personel militer Rusia di Krimea, belum termasuk staf sipil.

Selain faktor geostrategis, juga terdapat pertimbangan ekonomi menyangkut Krimea. Pertama, Ukraina merupakan jalur transit pipa migas Rusia, apabila jalur tersebut bermasalah maka Rusia dapat mengalihkannya ke arah selatan (Laut Hitam) tempat Krimea berada. Kedua, Ukraina adalah salah satu produsen jagung dan gandum terbesar di dunia, sebagian besar terdapat di wilayah Krimea. Berdasarkan data pemerintah Ukraina, lebih dari 50% ekonomi Krimea dikhususkan untuk industri pangan dan distribusi.⁴⁰ Ketiga, Krimea dapat menjadi *choke point* dalam alternatif jalur pipa energi hidrokarbon dari Rusia.

⁴⁰ Garry Adrian, “Ukraina Memanas; Beli Dollar atau Emas?”, *IM Trader*, Vol. 5, Maret-April 2014, hlm. 4.

Mengetahui arti strategis Krimea tersebut maka Rusia bergerak cepat. Pada 1 Maret 2014, parlemen Rusia menyetujui permohonan Presiden Rusia untuk penggunaan militer di Ukraina. Putin mengatakan bahwa etnis Rusia dan Armada Laut Hitam Rusia di Krimea terancam oleh situasi di Ukraina. Hal itu ditambah dengan permintaan formal presiden terguling Ukraina kepada Moskwa agar mengirim pasukannya untuk menegakkan hukum di Ukraina.⁴¹

Krimea berhasil dikuasai secara cepat oleh demonstran pro-Rusia tanpa adanya pertumpahan darah. Selain karena faktor pemerintah pusat di Kyiv yang masih sangat rapuh pasca tergulingnya Yanukovych, Rusia memiliki barak militer di Sevastopol dan mayoritas penduduk Ukraina di Krimea beretnis Rusia cenderung mendukung demonstran. Dengan dukungan tersebut referendum pun dilakukan untuk menentukan masa depan Krimea apakah akan tetap berada dalam Ukraina dengan otonomi yang lebih luas atau menjadi negara yang berdaulat.

Referendum Krimea

Pada 16 Maret 2014, masyarakat Krimea melaksanakan referendum dengan hasil sekitar 96% pemilih memutuskan untuk bergabung dengan Rusia. Di tengah krisis politik domestik yang belum menemukan penyelesaian, referendum ini memperumit kondisi krisis di Ukraina apalagi Barat menganggap referendum ini ilegal. Referendum ini kemudian mempertajam perseteruan antara Barat dengan Rusia.

Dari segi hukum, penilaian apakah referendum dilaksanakan secara legal atau ilegal memerlukan studi khusus yang mendalam dan memerlukan pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan hukum internasional, UUD Ukraina, dan instrumen hukum lainnya yang mengatur hubungan Krimea dengan Ukraina. Yang paling sulit adalah mendapatkan fakta-fakta yang akurat terkait dengan referendum tersebut. Banyak media massa yang membeberkan berbagai informasi seputar referendum itu seperti tuduhan adanya intervensi dan tekanan Rusia atas proses

itu. Namun, fakta-fakta tersebut masih perlu pendalaman lebih lanjut.

Artikel ini secara sederhana mencoba melihat secara berimbang *rationale* pihak yang anti dan pro-referendum, debat yang terjadi dalam tataran multilateral, penilaian akan hak penentuan nasib, dan pelajarannya bagi Indonesia. Tetapi sebelum membahas hal tersebut, terlebih dahulu akan dibahas implikasi perkembangan situasi pasca Krimea dan gejolak di Ukraina bagian timur.

Pasca Krimea

Respons anti-sistemik yang dilakukan Rusia di Krimea membuat Barat menjatuhkan sanksi ekonomi dan politik kepada Rusia berupa pembekuan aset dan tidak lagi melibatkan Rusia pada G-8 karena Rusia dianggap telah melanggar hukum internasional. Namun demikian, Eropa terlihat menjatuhkan sanksi secara terbatas untuk menghukum Rusia karena tidak ingin mengganggu hubungan dagang dengan Rusia dan beberapa negara Eropa secara ekonomi bergantung kepada Rusia dalam hal suplai gas.

Barat dan Rusia mempunyai potensi kerugian di bidang ekonomi apabila ketegangan di antara mereka terus berlanjut. Keduanya merupakan mitra dagang yang saling membutuhkan. Ekspor gas Rusia ke wilayah Eropa melalui jalur pipa Nord Stream dan Yamal mencapai 185 juta m³ per hari⁴² dan yang melewati Ukraina mencapai 16 juta m³ per hari. Adapun ekspor Rusia ke UE pada tahun 2013 mencapai 50% dari total eksponya, sedangkan ekspor UE ke Rusia mencapai 7% dari total eksponya.⁴³

⁴¹ Nick Bryant, "Ukraine's Yanukovych asked for troops, Russia tells UN" *BBC*, <http://www.bbc.com/news/world-europe-26427848>, diakses pada tanggal 5 Maret 2014.

⁴² ITAR-TASS News Agency, "Russia stops gas supplies to Ukraine, transit to EU totals 185 million cu m daily-Prodan", <http://en.itar-tass.com/economy/736286>, 15 Juni 2014.

⁴³ RT, "Who will threatened sanctions hit most? US-EU Russia trade in numbers", <http://rt.com/business/us-eu-russia-sanctions-590/>, diakses pada tanggal 8 April 2014.



Sumber: http://indonesia.rbthlm.com/multimedia/infographics/2014/03/07/jalur_pipa_gas_rusia_ke_uni_eropa_23359.html, diakses pada tanggal 20 September 2014.

Gambar 4. Jalur Pipa Gas Rusia via Ukraina.

Setidaknya terdapat tiga alasan mengapa Ukraina pasca Krimea menjadi ajang perebutan pengaruh antara Rusia dengan Barat. *Pertama*, faktor pipa gas Ukraina-Rusia-Turkmenistan. Hingga pecahnya Uni Soviet, jaringan pipa itu merupakan jaringan domestik. Saat ini, perdagangan gas antara Turkmenistan, Rusia dan Ukraina tidak hanya menjadi proposisi komersial, tetapi sebuah ilustrasi dependensi segitiga dari ketiga negara. Isu-isu kunci dalam hal transit ekspor gas ke Turkmenistan di luar Asia Tengah melewati Rusia, yang akhirnya dikendalikan secara penuh dari sekitar tiga perempat ekspor Turkmenistan. Dan posisi Rusia berhadapan dengan Ukraina sangat rentan karena sekitar 66% ekspor gas Rusia ke Eropa melewati Ukraina (lihat Gambar 4 dan 5).

Dengan demikian, Ukraina adalah titik transit serta titik penghambat bagi ekspor gas Rusia. Hal ini juga menjadi titik bocornya pengiriman. Pada awal 1990-an, terjadi gangguan serius ketika Ukraina melanggar kontrak gas dengan Rusia. Sejak saat itu pengiriman gas telah menjadi isu penting dalam hubungan politik dan keamanan antara Rusia dan Ukraina.

Kedua, Semenanjung Krimea menjadi markas bagi AL Rusia yang masa sewanya diperpanjang selama 25 tahun pada tahun 2010 dengan perjanjian khusus antara Presiden D. Medvedev dan V. Yanukovych, meskipun masih terdapat sengketa gas yang belum terselesaikan. Fasilitas ini menyediakan Moskwa dengan kemampuan militer strategis di daerah yang dianggap penting oleh Rusia bagi keamanan perbatasan barat daya dan pengaruh geopolitis dekat 'laut hangat' yang dapat mengancam Pax

Judaeca. Sebagai imbalan untuk perpanjangan sewa, Rusia setuju untuk penurunan 30% dalam harga gas alam yang dijual ke Ukraina.

Ketiga, kepentingan Barat dan Rusia di Ukraina bisa jadi bahwa yang terakhir merupakan pasar yang menjanjikan dari 45 juta konsumen potensial, dalam konteks di mana keduanya berusaha untuk mendiversifikasi ekonomi dan tujuan ekspornya.

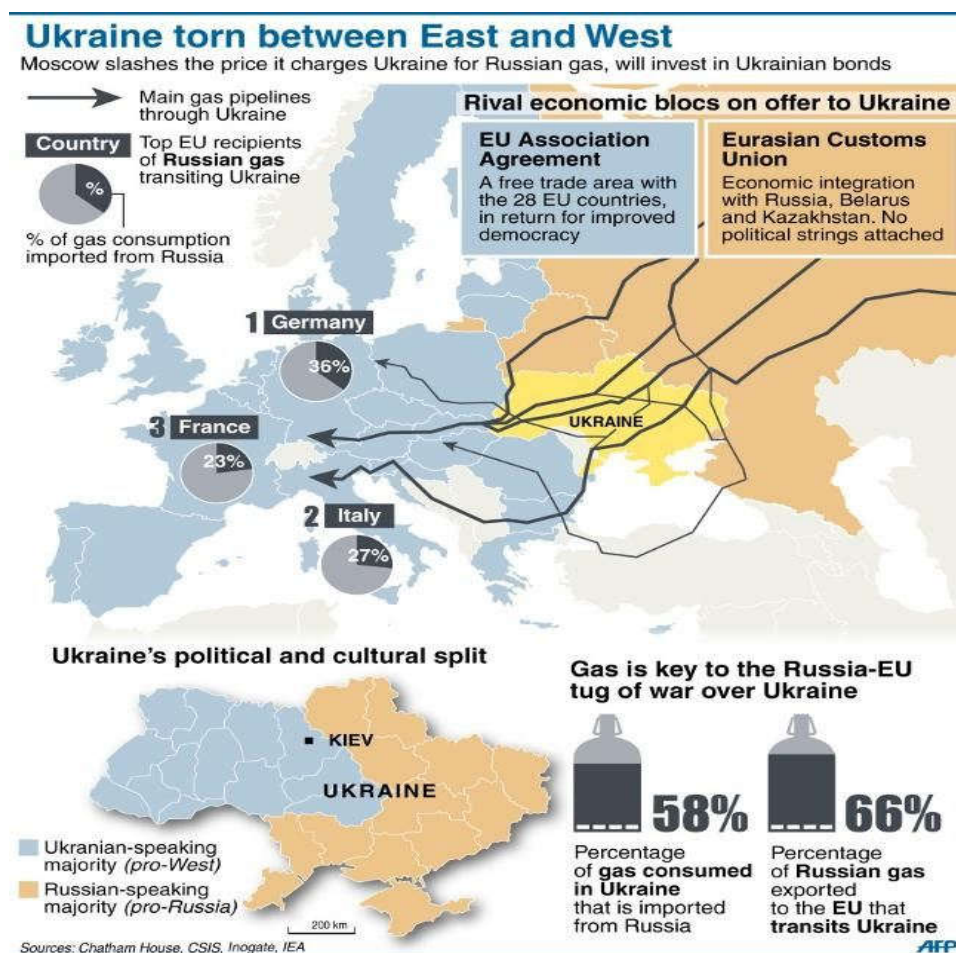
Gejolak di Timur Ukraina

Implikasi dari perkembangan situasi di Krimea mengakibatkan timbulnya pergerakan massa pro-Rusia yang semakin intensif khususnya di berbagai kota di wilayah timur Ukraina seperti: Kharkiv, Donetsk, Luhansk, Sloviansk, Odessa, Zaporizhzhia, dan Mykolayiv. Sebagian diantaranya menuntut diadakannya referendum

untuk penerapan negara federal Ukraina atau menggabungkan diri dengan Rusia.

Pada 11 Mei 2014, separatis pro-Rusia di bagian timur Ukraina mengadakan referendum kemerdekaan meski pemerintah Ukraina di Kyiv tidak mengakui referendum tersebut. Para pemilih di kawasan Donetsk dan Luhansk, yang penduduknya sekitar 15% dari populasi Ukraina, memberikan suara dengan hasil sekitar 90% warga di kedua wilayah tersebut memilih untuk melepaskan diri dari Ukraina. Kyiv membalas aksi separatisme tersebut dengan meluncurkan operasi anti-teroris skala besar menghadapi separatis pro-Rusia bersenjata yang menimbulkan korban di kedua belah pihak.

Menurut PBB, hingga September 2014, korban tewas dalam konflik Ukraina timur



Sumber: <https://pbs.twimg.com/media/BhvkmhHIUAAWc3Q.jpg:large>, diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

Gambar 5. Ukraina dalam Pusaran Fragmentasi dan Konflik Kepentingan

mencapai 3.543 jiwa, termasuk 298 korban pada kecelakaan pesawat Malaysia Airlines.⁴⁴ Badan Urusan Pengungsi PBB (UNHCR) menyatakan pada 27 Juni 2014 sekitar 110.000 orang telah melarikan diri dari Ukraina ke Rusia dan sekitar 54.400 warga Ukraina lainnya terpaksa mengungsi di dalam negeri Ukraina.⁴⁵ Sementara data per September 2014, menyatakan jumlah pengungsi sudah mencapai lebih dari 275.000 orang.

dan Luhansk. Pada 16 September 2014, Parlemen Ukraina menetapkan undang-undang otonomi luas untuk kawasan Donetsk dan Luhansk. Undang-undang baru ini adalah bagian dari kompromi dengan kelompok separatis pro-Rusia. Selain itu, kawasan timur diberikan hak untuk menyelenggarakan pemilu regional sendiri dan mendirikan pasukan keamanan di daerah-daerah otonomi. Para anggota separatis yang selama ini



Sumber: <http://www.bbc.com/news/world-europe-27308526>, diakses pada tanggal 21 Mei 2014.

Gambar 6. Peta Ukraina Timur

Pada tahun 2014 ini, pihak Ukraina dan separatis pro-Rusia telah menandatangani kesepakatan gencatan senjata di Minsk, Belarus. Pertemuan difasilitasi oleh Pemerintah Belarus dan dihadiri oleh perwakilan Rusia dan OSCE. Parlemen Ukraina juga menetapkan undang-undang otonomi luas untuk kawasan Donetsk

berperang melawan pasukan pemerintah akan mendapat amnesti, kecuali mereka yang terlibat dalam kejahatan besar. *Quid pro quo* dari UU tersebut, separatis pro-Rusia harus mencabut tuntutan untuk merdeka dari Ukraina. Meski terdapat gencatan senjata dan pembaharuan gencatan senjata secara penuh pada 20 September, kontak senjata masih terjadi dan menimbulkan korban sipil.⁴⁶

⁴⁴ "Death toll of Ukraine conflict exceeds 3,500-UN", Interfax-Ukraine, <http://en.interfax.com.ua/news/general/225196.html> diakses pada tanggal 27 September 2014.

⁴⁵ UNHCR, "Sharp Rise in Ukrainian displacement, with more than 50,000 internally displaced", <http://www.unhcr.org/53ad57099.html>, diakses pada tanggal 27 Juni 2014.

⁴⁶ "NATO: Gencatan Senjata di Ukraina Baru Sebatas Teori," *The Global Review*, http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=16304&type=103#.VCoiYVfuyso, diakses pada tanggal 25 September.

Perkembangan tersebut cukup memprihatinkan karena pada dasarnya Ukraina dan Rusia adalah negara bersaudara yang saling membutuhkan. Dari data yang ada, etnis Rusia terbesar di negara eks-Soviet berada di Ukraina (sekitar 29,6% etnis Rusia dari total penduduk Ukraina berdasarkan sensus tahun 2001). Sedangkan warga Ukraina terbesar di luar Ukraina berada di Rusia (lebih dari 2 juta orang).⁴⁷

Ketika masih bergabung dengan Uni Soviet, Ukraina menjadi negara termakmur keempat di dalam Soviet. Setelah Soviet runtuh, hal tersebut tidak hanya memberikan kesempatan pada Ukraina untuk meraih kemerdekaannya tetapi juga membuka kotak pandora dari konflik etnis antara barat dan timur Ukraina. Revolusi Oranye di tahun 2004 dan Euromaidan di tahun 2013 membingkai suramnya skenario Ukraina yang terfragmentasi antara wilayah pro-Barat dan pro-Rusia. Fragmentasi ini semakin lebar sejak aksi Euromaidan karena sistem demokrasi konstitusional nampaknya tidak cukup meyakinkan para demonstrator sebagai *rules of the game* di Ukraina. Bahkan, *The Global Times*, koran berpengaruh yang diterbitkan Harian Rakyat milik Partai Komunis Cina, menilai bahwa Ukraina saat ini didominasi oleh politik jalanan dengan parlemen hanya sebagai alat politik tambahan semata.⁴⁸

Setelah melalui banyak perubahan kondisi, ekonomi Ukraina pernah turun dengan pendapatan perkapita berkisar \$3.200, lebih rendah sedikit dari Indonesia, setengahnya Cina, dan seperempatnya Rusia. Ukraina yang dilanda kerusuhan sejak November 2013 mendapatkan perhatian yang luas dari dunia karena pertentangan Barat dengan Rusia. Barat yang dengan simpatinya yang luar biasa terhadap krisis Ukraina acapkali mengganggu urusan internal Ukraina dengan menghasut partai/kelompok oposisi dengan melawan rezim *incumbent*. Di sisi lain, Rusia yang tak

kalah simpatinya dengan saudaranya tersebut menginginkan agar Ukraina tidak bergabung dengan UE/NATO atau setidaknya berada dalam *status quo*.

Dengan kondisi demikian, terdapat kemungkinan Ukraina terbelah dua. Apabila memang demikian, populasi Ukraina yang di tahun 2014 berjumlah sekitar 50 juta penduduk akan terenggam kembali oleh kesengsaraan yang tak terbayangkan. Pemisahan antara barat dan timur Ukraina sulit didefinisikan dan nampaknya tidak ada yang dapat mengendalikan perang saudara yang terjadi saat ini. Dan oleh karena itu Kyiv berusaha sekuat tenaga agar wilayahnya di bagian timur tidak menjadi seperti Krimea, yang menurut Kyiv, dianeksasi oleh Rusia lewat referendum yang tidak sah.

Posisi Ukraina terkait Referendum Krimea

Ukraina tidak menerima referendum yang digelar di Krimea. Kyiv meminta agar semua negara, lembaga-lembaga internasional, dan badan-badan khusus agar tidak mengakui pergantian status Krimea berdasarkan referendum.

Pada tanggal 16 Maret 2014, Parlemen Ukraina menyatakan bahwa pelaksanaan referendum di Krimea pada 16 Maret 2014 adalah tidak sah karena bertentangan dengan UUD Ukraina. Pasal 73 UUD Ukraina menyebutkan *issues of altering the territory of Ukraine are resolved exclusively by an All-Ukrainian referendum*. Selanjutnya pasal 134 UUD Ukraina menyebutkan *the Autonomous Republic of Krimea is an inseparable constituent part of Ukraine and decides on the issues to its competence within the limits of authority determined by the Constitution of Ukraine*.⁴⁹ Sedangkan berdasarkan pasal 7 (2) UU Republik Otonomi Krimea (yang telah disahkan dalam UUD Ukraina No. 350-XIV tanggal 23 Desember 1998) pada intinya menyebutkan bahwa referendum republik (lokal) diperbolehkan dalam hal melakukan perubahan atas wilayah Republik Otonomi Krimea sepanjang tidak bertentangan dengan UUD Ukraina. Selain itu, Ukraina berpendapat bahwa Rusia jelas telah

⁴⁷ Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, "Comparative Data on Protection of Russian Ethnic Minority's Right in Ukraine and Ukrainian Ethnic Minority's Rights in Russia", 14 Maret 2014.

⁴⁸ "West-Russia rivalry bleeds Ukraine dry" *Global Times*, <http://backup.globaltimes.cn/NEWS/tabid/99/ID/843608/West-Russia-rivalry-bleeds-Ukraine-dry.aspx>, diakses pada tanggal 21 Februari 2014.

⁴⁹ Lihat Constitution of Ukraine. Chapter III, Article 73 & Chapter X, Article 134.

melanggar Memorandum Budapest tahun 1994 yang menghormati kedaulatan Ukraina.

Selanjutnya, dalam pertemuan khusus Grup Asia Pasifik di New York pada 19 Maret 2014, Perwakilan Tetap Ukraina di PBB menyampaikan uraian resmi pemerintah Ukraina mengenai referendum Krimea sebagai berikut (*Journal of the United Nations*, No. 2014/51):

- Proses peralihan otoritas maupun penyelenggaraan referendum mengenai pemisahan Krimea dari Ukraina berlangsung secara ilegal.
- Penduduk Krimea berjumlah sekitar 2,5 juta, dimana 1,5 juta merupakan keturunan Rusia dan 1 juta penduduk terdiri atas keturunan Krimea Tatar, Bulgaria dan lain-lain.
- Penduduk Krimea di luar keturunan Rusia telah memboikot rencana penyelenggaraan referendum. Dengan demikian, hasil referendum di mana 90% dinyatakan mendukung pemisahan Krimea dari Rusia, tidak mencerminkan realitas di lapangan.
- Deklarasi kemerdekaan Krimea serta permintaan untuk menjadikan Krimea sebagai wilayah Rusia oleh parlemen Krimea adalah ilegal.
- Ditegaskan bahwa penting bagi PBB untuk menyampaikan proses yang tidak sah akan referendum Krimea dan permohonan kepada negara-negara anggota untuk tidak mengakui referendum maupun kemerdekaan Krimea.
- Ditegaskan pula bahwa peristiwa Krimea merupakan tantangan terhadap sistem PBB dan kiranya merupakan pelajaran mengenai bagaimana menggunakan piagam PBB dalam cara yang layak untuk menjamin integritas wilayah.

Posisi Rusia terkait Referendum Krimea

Rusia berpendapat bahwa referendum di Krimea adalah keinginan rakyat Krimea. Lebih dari 90% rakyat Krimea memilih untuk bergabung dengan Rusia. Dengan demikian, referendum berjalan

dengan sah, demokratis, sesuai dengan hukum internasional, berjalan baik dan aman karena tidak ada pertumpahan darah. Rusia berpendapat bahwa referendum diatur dalam hukum internasional, antara lain, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yaitu *all peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social, and cultural development.*

Rusia menganggap situasi di Krimea merupakan analogi mutlak dari pengakuan kemerdekaan Kosovo oleh Barat. Secara khusus Rusia mengutip keputusan Mahkamah Internasional pada 2010 yang memutuskan Kosovo memiliki hak untuk mendeklarasikan kemerdekaan unilateralnya dari Serbia. Keputusan itu mengakui bahwa deklarasi kemerdekaan dapat melanggar peraturan negara, tetapi itu tidak berarti melanggar hukum internasional. Keputusan Mahkamah Internasional mengatakan bahwa "Tidak ada larangan apapun terhadap deklarasi kemerdekaan sepihak, bahkan oleh Dewan Keamanan (DK) PBB. Tidak ada larangan yang berlaku terhadap deklarasi kemerdekaan sepihak dalam *Jus Cogens* (prinsip dasar hukum Internasional)."⁵⁰ Saat itu, keputusan Mahkamah Internasional memicu reaksi keras para pemimpin dunia, termasuk Rusia. Kremlin menganggap kemerdekaan Kosovo mengancam dan merusak tatanan hukum internasional. Untuk itu, saat ini Rusia mempertanyakan mengapa Barat menerapkan standar ganda dengan menyetujui kemerdekaan Kosovo tetapi tidak mengakui Krimea.

Terkait dengan Memorandum Budapest tahun 1994, Rusia menganggap tidak melanggar kewajibannya dalam Memorandum tersebut. Rusia berpendapat hilangnya keutuhan wilayah Ukraina di Krimea menjadi akibat dari berbagai proses internal yang rumit dan tidak ada sangkut pautnya dengan Rusia dan kewajibannya sesuai dengan Memorandum Budapest. Hal itu karena Pemerintah Kyiv mendapatkan kekuasaannya melalui kudeta inkonstitusional

⁵⁰ Oleg Fomichev, "Putin: Kami Tidak Ingin Memecah Ukraina" *RBTH Indonesia*, http://indonesia.rbth.com/politics/2014/03/19/putin_kami_tidak_ingin_memecah_ukraina_23425.html, diakses pada tanggal 20 Maret 2014.

dan kebijakannya, khususnya mengenai etnis minoritas, telah merobek kesatuan Ukraina dan mengancam daerah yang tidak sejalan dengan Kyiv.⁵¹ Hal ini karena Gerakan Maidan yang sukses merebut kekuasaan dari *incumbent* sebagian besar terdiri dari perwakilan bagian barat. Ideologi mereka ialah tidak menghendaki adanya konsensus publik dengan perwakilan bagian timur, seperti ideologi nasionalisme Ukraina yang tunggal dan solid. Nasionalisme Ukraina muncul sebagai ideologi pada awal abad ke-20 dan memiliki sifat yang sama dengan Nazisme Jerman dan ideologi-ideologi sayap kanan pada waktu itu.⁵²

Hal itu menjelaskan intoleransi ekstrim, kecenderungan tindakan politik frontal, kekerasan, dan pengingkaran hak kaum minoritas dalam nasionalisme Ukraina. Nasionalis Ukraina menilai “tangan besi” dibutuhkan untuk membangun negara dan menindas elemen-elemen non-Ukraina di masyarakat. Masalahnya, elemen non-Ukraina di Ukraina jumlahnya sangat banyak. Pemikiran itulah yang mendasari semua ideologi nasionalisme Ukraina, yakni musuh utama bangsa Ukraina adalah “Moskal” (sebutan untuk orang Rusia) yang tidak menghargai nasionalisme Ukraina. Bukan hanya orang Rusia saja, tetapi juga orang Polandia dan Yahudi. Menurut para sejarawan Polandia, sekitar 150.000 warga Polandia terbunuh dalam *pogrom* (tindakan kekerasan besar-besaran) terhadap bangsa Yahudi di Ukraina barat, dan juga dalam peristiwa pembunuhan massal Volhynian 1943-1944.⁵³

⁵¹ The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 2014, “Statement by the Russian Ministry of Foreign Affairs regarding accusations of Russia’s violation of its obligation under the Budapest Memorandum of 5 December 1994”, 1 April 2014.

⁵² Frassminggi Kamasa, “Dinamika Kawasan Eropa Tengah dan Timur dan Kepentingan Indonesia”, Makalah disampaikan pada acara *Workshop Perdamaian dan Hubungan Internasional di Amerika dan Eropa*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 5 September 2014, hlm. 5.

⁵³ Vyacheslav Charskiy, “Gerakan Maidan: Nasionalis, atau Pemberontak Ukraina?” *RBTH Indonesia*, http://indonesia.rbth.com/politics/2014/05/05/gerakan_maidan_nasionalis_atau_pemberontak_ukraina_23731.html, diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

Pembahasan Ukraina di PBB

Setidaknya PBB telah melakukan 23 sesi yang membahas krisis Ukraina dari Februari-September 2014 (RBTH, 2014). Artikel ini memaparkan tujuh dari 23 pertemuan mengenai situasi di Ukraina dan Krimea tersebut.

Pertama, pada 28 Februari 2014 atas permintaan perwakilan tetap Ukraina di PBB agar DK menyelenggarakan pertemuan darurat sesuai Pasal 34 dan 35 Piagam PBB mengingat situasi di daerah otonom Krimea merupakan ancaman terhadap integritas wilayah Ukraina.

Kedua, pada 15 Maret 2014 DK PBB telah melakukan pungut suara terhadap rancangan resolusi (ranres) yang disusun AS yang pada intinya menegaskan bahwa referendum di Krimea tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengubah status Krimea. AS menegaskan bahwa masyarakat internasional tidak akan pernah mengakui hasil referendum tersebut. Mayoritas anggota DK mendukung ranres karena memuat prinsip-prinsip piagam PBB, khususnya terkait keperluan untuk menghormati kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara. Selain itu, ranres menekankan keperluan untuk mencari penyelesaian secara damai melalui dialog politik langsung dan penurunan ketegangan.

Ranres gagal karena diveto oleh Rusia. Sebelum ranres dipungutsuarakan, dalam penjelasan sebelum pemungutan suara, Rusia menyampaikan alasan pihaknya menolak karena tidak menyetujui asumsi dasar referendum di Krimea adalah ilegal. Dijelaskan bahwa referendum dilakukan oleh rakyat Krimea akibat keadaan luar biasa yang menyebabkan kehidupan berdampingan secara damai tidak memungkinkan dilakukan di Krimea.

Satu-satunya anggota DK PBB yang abstain dalam ranres ini adalah Cina. Cina memilih abstain dengan alasan bahwa pengajuan ranres tidak tepat waktunya dan akan membuat situasi lebih rumit walaupun penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah serta prinsip non-intervensi merupakan dasar kebijakan luar negeri Cina.

Ketiga, konsultasi tertutup DK PBB mengenai situasi Ukraina pada 28 Maret 2014 sebagai *good offices* Sekjen PBB ke

Moskwa dan Kyiv untuk bertemu dengan kedua pemimpin negara tersebut guna menenangkan situasi dan mencari solusi politik terhadap krisis di Ukraina. Dalam konsultasi tersebut, negara-negara anggota DK dari kelompok Barat menyampaikan (1) keprihatinan mereka atas *military build-up* di perbatasan timur Ukraina yang dinilai provokatif; (2) aneksasi Rusia atas Krimea tidak sah; (3) Rusia harus segera menarik pasukannya dari Krimea dan segera memulai dialog dengan Ukraina untuk mengatasi krisis; (4) Tim pemantau PBB maupun OSCE harus diberikan akses masuk ke Krimea untuk dapat memantau situasi HAM di daerah tersebut.

Rusia menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa misi pemantauan OSCE tidak diperbolehkan masuk ke Krimea karena sudah menjadi wilayah Rusia. Untuk mengakhiri krisis di Ukraina yang dibutuhkan adalah penerapan secara penuh perjanjian 21 Februari 2014, termasuk reformasi UUD. Dan mengingat bahwa terdapat elemen-elemen radikal pada pemerintahan Ukraina, maka Rusia menilai bahwa para pemimpin Ukraina tidak kredibel.

Keempat, pada 23 Maret 2014 Majelis Umum PBB telah melakukan pungut suara terhadap ranres *The Territorial Integrity of Ukraine* yang pada intinya memuat komitmen pada kedaulatan dan keutuhan wilayah Ukraina, menyerukan agar para pihak mencari cara-cara damai dalam menyelesaikan masalah, dan menggarisbawahi tidak sahnya hasil referendum Krimea. Hasil pemungutan suara terhadap ranres tersebut adalah 100 negara mendukung, 11 negara menolak, 58 negara abstain, dan 24 negara absen/tidak berpartisipasi. Hasil ini dapat dikatakan cukup berimbang yang menunjukkan di satu sisi separuh dari anggota PBB mendukung resolusi dan di sisi lain menunjukkan hampir separuh dari anggota PBB, dalam bentuk satu dan lain hal, tidak mendukung resolusi yang dimotori oleh negara-negara Barat dengan tujuan, yang menurut Rusia, untuk mengisolasi Rusia.

Kelima, pada 2 Mei 2014 atas permintaan Rusia, DK PBB telah mengadakan pertemuan darurat untuk membahas situasi di Ukraina. Rusia menjelaskan bahwa alasan pihaknya meminta DK melakukan pertemuan disebabkan oleh operasi *punitive* yang terus dilakukan

oleh Kyiv di wilayah tenggara Ukraina, di mana dalam aksi tersebut digunakan helikopter militer dan pemukulan terhadap demonstran yang telah mengakibatkan korban jiwa. Rusia menegaskan, jika aksi-aksi kriminal Kyiv tidak dihentikan maka konsekuensinya tidak akan dapat dihindari. Ditekankan bahwa aksi-aksi tersebut menunjukkan ketidakmauan Kyiv untuk mematuhi Kesepakatan Jenewa pada 17 April 2014. Rusia juga menyerukan kepada AS untuk menghentikan praktek standar gandanya dan mencampuri urusan Ukraina, di mana dukungan AS dan UE kepada pihak yang melakukan kudeta di Ukraina dinilai memberangus jalan menuju solusi yang damai.

Kesepakatan Jenewa adalah pertemuan empat pihak Ukraina, Rusia, AS, dan UE membahas krisis Ukraina. Pertemuan tersebut menghasilkan dokumen mengenai kesepakatan untuk meredakan ketegangan di Ukraina. Beberapa poin penting yang disepakati antara lain:⁵⁴

- Mengecam tindakan ekstrimisme, rasisme, dan intoleransi, serta menyerukan agar semua pihak menahan diri dari segala tindakan kekerasan dan provokatif.
- Agar seluruh pihak bersenjata meletakkan senjata dan membebaskan serta mengosongkan tempat-tempat yang dikuasai secara ilegal.
- Pemberian amnesti kepada pihak yang meninggalkan gedung dan meletakkan senjata, kecuali bagi yang dianggap melakukan kesalahan besar.
- Misi pengamat OSCE akan berperan membantu otoritas Ukraina dan komunitas lokal dalam de-eskalasi situasi.
- Proses reformasi konstitusional akan dilakukan secara inklusif dan akuntabel.

Keenam, pada 25 Mei 2014, usai pertemuan mengenai masalah HAM di Ukraina, Rusia meminta PBB untuk menyelidiki insiden kebakaran di kota Odessa pada 2 Mei 2014 yang

⁵⁴ European Union External Action, "Joint Statement Geneva Statement on Ukraine," Geneva, 17 April 2014.

mengakibatkan korban jiwa lebih dari 40 orang. Rusia mengungkapkan bahwa penyelidikan telah dilakukan dengan hasil adanya bukti penggunaan bahan kimia sebagai penyebab kebakaran tersebut.

Ketujuh, pada 17 September 2014, atas inisiatif Rusia telah dibahas mengenai aspek kemanusiaan dan pengiriman bantuan kemanusiaan serta kebutuhan umum untuk memulai upaya penyelesaian konflik secara politis di Ukraina. Barat tidak mendukung hal itu. Dan permintaan Rusia untuk memfokuskan upaya masyarakat internasional mengakhiri pertumpahan darah dan memulai dialog politik antara pihak-pihak yang terlibat konflik juga mengalami jalan buntu.

Baik pertemuan di PBB dan Kesepakatan Jenewa ternyata belum dapat menyelesaikan dan menemukan solusi damai bagi krisis Ukraina. Hal itu memperlihatkan delapan hal yang penting untuk dicermati.

Pertama, adanya perpecahan sikap, posisi, dan perbedaan pandangan negara-negara anggota PBB terhadap prinsip-prinsip PBB, khususnya penghormatan terhadap kedaulatan, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan integritas wilayah suatu negara, serta keperluan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Dari sini terlihat bahwa konsep kedaulatan bersifat nisbi tergantung dari perspektif kekuatan yang memutuskannya.

Kedua, walaupun isi ranres memuat prinsip-prinsip Piagam PBB, khususnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara, namun belum menyentuh akar permasalahan krisis dan hal itu membuat penggunaannya terlihat bias dan memihak. Hal itu mengindikasikan pula adanya muatan politis Barat dibalik pengajuan ranres terkait krisis politik di Ukraina.

Ketiga, pengajuan ranres mengenai krisis politik Ukraina juga dapat dinilai bukan semata-mata hanya sebatas substansi ranres, yakni prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara, namun juga tidak konsistennya negara-negara Barat dalam mengedepankan isu terkait prinsip tersebut, di mana pada kasus Kosovo, AS dan UE justru mendukung pemisahan Kosovo dari Serbia.

Keempat, beberapa negara yang belum secara lugas menyampaikan posisi nasionalnya dapat dilihat sebagai bentuk dilema prioritas dalam hubungan bilateral mereka dengan *major powers* yang terlibat dalam krisis Ukraina sehingga menyulitkan posisi mereka untuk mengambil sikap.

Kelima, konsekuensi logisnya masalah keamanan dan perdamaian dunia, seperti krisis politik di Ukraina, didominasi oleh *major powers* yang bersikap tidak demokratis dan mengancam perdamaian dunia. Negara-negara berkembang kemudian hanya menjadi pemain pinggiran bukan mitra yang sejajar, pemain kunci, apalagi aktor utama yang dapat mengambil sikap politik secara independen atau mengarusutamakan suatu kebijakan politik.

Keenam, resolusi PBB dapat dimainkan bukan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah tetapi sebagai propaganda *major powers* dalam bentuk pemerasan politik dan ancaman ekonomi untuk menekan anggota PBB untuk menyetujui resolusi yang ditawarkan.

Ketujuh, dengan demikian resolusi tersebut belum mencerminkan hubungan berdasarkan persamaan hak, saling menghormati, dan saling mempertimbangkan kepentingan di antara negara-negara yang berdaulat.

Kedelapan, dalam perspektif yang lebih luas terdapat kecenderungan *major powers* saling bersaing untuk mendikte aturannya di negara lain, mengatur semuanya, dan memberlakukan aturan secara seragam atas perilaku dan kehidupan masyarakat dunia.

Standar Ganda Hak Penentuan Nasib

Referendum merupakan bentuk hak untuk menentukan nasib sendiri yang diakui dalam hukum internasional. Menurut Sujatmoko, hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan suatu prinsip hukum internasional yang secara normatif telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, antara lain, yaitu: Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB; Pasal 1 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*; Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) 14 Desember 1960 tentang

Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Bangsa dan Negara Terjajah; Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) 24 Oktober 1970 mengenai Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Kerja Sama dan Hubungan Bersahabat di antara Negara-negara dan Hubungan Bersahabat sesuai dengan Piagam PBB.⁵⁵

Menurut perspektif tersebut, dengan demikian referendum di Krimea merupakan bentuk pelaksanaan hak untuk menentukan nasib sendiri, meskipun menimbulkan permasalahan internasional. Inti permasalahan tersebut adalah pada sah tidaknya penggabungan Krimea ke Rusia. Barat menganggap pelaksanaan referendum di Krimea merupakan cara Rusia untuk melakukan aneksasi terhadap Krimea. Aneksasi dalam hukum internasional merupakan perolehan wilayah secara tidak sah. Rusia tidak melihatnya demikian.

Menurut Juwana, situasi penggabungan Krimea ke Rusia di bawah ancaman penggunaan kekerasan oleh militer Ukraina mirip ketika Timor Timur bergabung ke Indonesia tahun 1976. Negara-negara Barat, Eropa dan AS, menganggap proses formal tidak cukup. Beda antara Indonesia dan Rusia saat ini adalah Indonesia ketika itu dianggap tidak mempunyai kekuatan yang memadai ketika berhadapan dengan negara-negara Barat. Tentu tidak demikian bagi Rusia. Rusia sangat mampu untuk menghadapi negara-negara Barat, baik dalam proses damai maupun tidak damai. Dalam proses damai, Rusia memiliki hak *veto* di DK PBB. Rusia akan mudah *memveto* apa pun resolusi DK PBB yang tidak menguntungkan mereka.⁵⁶

Dengan demikian, terlihat adanya standar ganda Barat mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri. Sistem/masyarakat internasional masih menerapkan inkonsistensi yang diterapkannya terkait isu referendum, kedaulatan, dan hak penentuan nasib. Di masa lalu, Barat tidak

menghiraikan negara-negara yang melakukan referendum seperti di Transnistria pada 2006, Ossetia Selatan pada 2006, Catalonia pada 2013 dan pada beberapa kasus bahkan turut aktif mendukungnya seperti di Timor Timur pada 1976 dan 1999, Kosovo pada 2008, Sudan Selatan pada 2011, dan Kepulauan Falkland/Malvinas pada 2013, dan rencana referendum Skotlandia pada 2014.⁵⁷ Bahkan hingga saat ini Barat tanpa *reserve* mendukung okupasi Israel di Palestina dan pemisahan Taiwan dari Cina.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya tidak terdapat prinsip-prinsip hukum internasional yang riil yang mengatur dan melindungi kedaulatan suatu bangsa dalam hubungan internasional saat ini. Hal itu tergantung daripada kepentingan, kekuatan, daya tawar dan kriteria dari masing-masing pihak yang mengingkingkan satu hal dan menolak hal yang lain. Keadaan semacam ini apabila dibiarkan terus terjadi akan menciptakan anarki yang akan menerapkan hukum rimba. Konsekuensinya, kekerasan dalam hubungan antar negara adalah hal yang lumrah dan bahkan kekerasan merupakan fitur endemik sistem/masyarakat internasional yang anarki serta kontrol kekerasan atau konflik tersebut dilakukan melalui hukum internasional yang ditentukan oleh *power politics*.

Belajar dari Krimea

Dengan memperhatikan aspek-aspek politik dan hukum di atas, Indonesia perlu berhati-hati dalam menentukan sikap atas keabsahan referendum Krimea dan mencermati implikasinya bagi penanganan kasus separatisme di tanah air. Kejadian semacam Krimea dapat menimbulkan preseden yang berbahaya bukan saja bagi perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, tetapi juga kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah suatu bangsa dan negara. Menyatakan hasil referendum Krimea tidak sah secara terbuka akan membenturkan Indonesia dengan Rusia.

Di sisi lain, Indonesia tidak dapat menyatakan referendum sah karena dapat berdampak terhadap sikap negara-negara yang menentang referendum

⁵⁵ Andrey Sujatmoko, "Kemerdekaan Sebagai Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri (Right to Self-Determination) dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus terhadap Kemerdekaan Kosovo)", hlm. 3-5.

⁵⁶ Hikmahanto Juwana, "Krimea: Menjaga agar Tak Jadi Perang Panas," *Koran Sindo*, <http://law.ui.ac.id/v2/buletin/media/50-Krimea-menjaga-agar-tak-jadi-perang-panas>, diakses pada tanggal 10 April 2014.

⁵⁷ RT, "5 Referendums that the West has not taken issue with", <http://rt.com/news/referendums-ukraine-west-relations-782/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2014.

Krimea. Dan hal itu kemudian akan dapat memberikan peluang bagi gerakan-gerakan separatisme domestik. Mempertimbangkan hal tersebut, Indonesia menghindari memberikan pernyataan mengenai keabsahan referendum Krimea hingga tiba waktu dan kesempatan yang tepat. Indonesia memberikan posisinya secara umum terkait krisis politik di Ukraina pada 4 Maret 2014 sebagai berikut:

- RI prihatin atas semakin memburuknya kondisi di Ukraina, yang semula menyangkut ketidakstabilan politik di dalam negeri negara, kini berkembang menjadi suatu krisis internasional yang tidak saja mengancam kedaulatan serta keutuhan wilayah negara Ukraina, melainkan juga beresiko meningkatkan ketegangan hubungan antara negara-negara terkait;
- Indonesia menegaskan posisi prinsipnya selama ini dalam menghadapi berbagai permasalahan internasional yang senantiasa menjunjung tinggi penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah sebagai prinsip dasar hubungan antar negara;
- Indonesia mendorong semua pihak yang terkait untuk menahan diri, mengelola krisis (*crisis management*) dan mengutamakan penyelesaian damai situasi di Ukraina dan senantiasa menghormati hukum internasional;
- Indonesia juga menyerukan kepada DK PBB, termasuk negara-negara anggota tetap DK PBB, agar memikul tanggung jawabnya sesuai Piagam PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional menyangkut krisis di Ukraina, termasuk kemungkinan melalui pengiriman utusan khusus Sekjen PBB ke kawasan terkait.⁵⁸

Dan baru setelah pembahasan referendum di Krimea dibahas di PBB pada 15 Maret 2014 maka

Indonesia kemudian memformulasikan posisinya terhadap referendum Krimea. Pada 21 Maret 2014, Menteri Luar Negeri RI menyampaikan posisi RI terkait referendum Krimea sebagai berikut (Kementerian Luar Negeri RI, 2014):

- Indonesia konsisten mendukung integritas teritorial suatu negara dan *inviolability of borders*, serta tidak bisa menerima langkah apapun yang melanggar kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara. Terkait hal ini, di satu sisi Indonesia dapat mendukung pemisahan suatu wilayah dari suatu negara jika disetujui negara induknya, contoh: pemisahan Montenegro dari Serbia, serta Sudan Selatan dari Sudan. Di sisi lain, Indonesia menolak pemisahan suatu wilayah dari suatu negara yang dilakukan secara sepihak, sebagaimana kasus Kosovo dari Serbia, serta Abkhazia dan Ossetia Selatan dari Georgia tersebut. Dalam isu Krimea, Indonesia juga mengedepankan dan memegang teguh posisi prinsip tersebut. Dengan demikian, Indonesia tidak mendukung pemisahan Krimea dari Ukraina, karena tidak melalui persetujuan negara induknya;
- Indonesia juga senantiasa menghormati proses konstitusional dan penegakan prinsip-prinsip demokrasi. Merujuk gejala politik di Ukraina sebelumnya, Indonesia tidak ingin melihat perubahan sebuah pemerintahan yang sebenarnya terpilih secara sah dilakukan melalui aksi yang tidak konstitusional;
- Indonesia menekankan penyelesaian politik secara damai melalui dialog nasional yang inklusif melibatkan semua pihak, serta;
- Mendukung upaya-upaya menurunkan ketegangan dan promosi penyelesaian sengketa secara damai.

Dari pernyataan tersebut Indonesia telah bersikap jelas bahwa kedaulatan negara adalah hal prinsipil yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam kasus Ukraina, Indonesia secara implisit

⁵⁸ Kementerian Luar Negeri RI, "Indonesia Serukan Sikap Menahan Diri dan Penyelesaian Damai Krisis Ukraina", <http://kemlu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=6832&l=id>, diakses pada tanggal 4 Maret 2014.

memahami bahwa revolusi berwarna di Kyiv adalah kudeta yang menimbulkan eskalasi krisis politik di Ukraina. Oleh karena itu, karena tidak menginginkan hal itu terjadi di tanah air, Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap integritas wilayah dan tidak ikut campur dalam negeri negara lain. Untuk itu, Indonesia meminta agar semua pihak yang berkonflik menahan diri dan mengedepankan penanganan krisis dengan jalan damai serta menghormati hukum internasional.

Dengan demikian, posisi Indonesia terlihat cukup seimbang, konsisten, dan impersonal. Indonesia tidak mengaitkan dengan hubungan Utara-Selatan atau Timur Barat tetapi berdasarkan prinsip-prinsip nasional. Posisi Indonesia cukup konsisten karena dalam menghadapi berbagai situasi serupa di berbagai kawasan, Indonesia berprinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah sebagai dasar hubungan antar bangsa. Hal itu terefleksikan pada pandangan RI dalam kasus Kosovo, Abkhazia, dan Ossetia Selatan yang berbeda dengan kasus Sudan Selatan dan Montenegro yang mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Meski harus diberikan catatan bahwa posisi tersebut terlihat canggung karena secara faktual tidak ada pemerintah yang ingin melepaskan wilayahnya secara *genuine* dan damai.

Oleh karena itu, artikel ini berpendapat untuk amannya, selanjutnya dalam fora internasional, Indonesia dapat untuk tidak memihak namun tetap menyuarakan posisi prinsipilnya. Tidak memihak, secara realistis, adalah hal yang terbaik yang dapat dilakukan Indonesia untuk memagari kedaulatan NKRI. Dan upaya memagari kedaulatan NKRI setidaknya dapat dilakukan melalui sinergi kebijakan dalam dan luar negeri Indonesia.

Dalam kebijakan dalam negeri, Indonesia perlu mengatasi sumber konflik daerah bergejolak di tanah air. Secara umum sumber konflik daerah bergejolak di Indonesia, misalnya di Papua, adalah karena adanya pelanggaran HAM dan kekerasan, eksploitasi SDA, pembangunan ekonomi yang lambat, marginalisasi masyarakat, dan sejarah integrasi. Selain itu, Indonesia perlu menyeimbangkan antara pendekatan kebebasan dan keamanan dalam mengatasi

potensi disintegrasi nasional. Pendekatan otoriter yang tidak menyerap aspirasi rakyat justru membuat konflik semakin dalam dan lebar. Meski demikian, tindakan tegas perlu dilakukan terhadap intervensi asing dalam kasus separatisme di Indonesia.

Terkait dengan intervensi asing dalam kasus separatisme di Indonesia, Chomsky (2013) berpendapat bahwa AS dan Australia sebagai aktor utama di balik kasus Timor Timur karena kepentingan untuk membendung efek domino Komunisme di Asia Tenggara. Indonesia hanyalah negara yang didukung oleh AS untuk menjalankan skandal tersebut. Hal yang sama, menurut Chomsky, juga terjadi pada kasus Papua.⁵⁹ Oleh karena itu, selain fokus untuk mengatasi tekanan internal dengan pendekatan kesejahteraan, kebebasan, dan keamanan yang berimbang, Indonesia juga perlu fokus dan waspada akan intervensi asing dan jalinan komprador dalam negeri melalui revolusi berwarna.

Berbagai skema bantuan melalui isu demokratisasi, penyebaran HAM, dan penguatan kapasitas untuk *good governance* di seluruh daerah Indonesia pada umumnya, dan daerah rawan separatisme pada khususnya, perlu dicermati dan dikelola dengan mengedepankan aspek wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Hal itu karena, seperti yang terlihat pada krisis Ukraina, dalam hubungan internasional saat ini berbagai manuver tersebut telah dilakukan oleh sistem/masyarakat internasional untuk mendestabilisasi, menjatuhkan rezim, atau bahkan mem-balkanisasi suatu negara yang tidak sejalan dengan agenda dan kepentingannya.

Dalam kebijakan luar negeri, upaya memagari kedaulatan bangsa/negara dapat dilakukan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral. Dalam upaya bilateral perlu dilakukan pendekatan kepada individu dan kelompok gerakan separatis di Indonesia, menangkal diseminasi informasi terkait kondisi

⁵⁹ Victor Mambor, "Noam Chomsky: Kasus Papua Barat itu 'Major Scandal'" *Papua Post*, <http://papuapost.com/2013/12/noam-chomsky-kasus-papua-barat-itu-major-scandal/>, diakses pada tanggal 3 Juli 2014. "There have been efforts to move to an independent Asia. Noam Chomsky interviewed by Prodi Sabarini" *The Jakarta Post*, <http://www.thejakartapost.com/news/2014/03/19/there-have-been-efforts-move-independent-asia.html>, diakses pada tanggal 3 April 2014.

daerah separatistis atau proses integrasi ke dalam NKRI, pengembangan otonomi khusus yang bertanggung jawab, pelaksanaan repatriasi, dan lobi intensif kepada pemerintah negara akreditasi untuk memperoleh dukungan atas integritas wilayah RI. Dalam upaya regional, Indonesia dapat berpartisipasi sebagai mitra dialog dalam berbagai forum di mana aktor intelektual gerakan separatistis bermain. Dalam upaya multilateral, Indonesia dapat melakukan lobi, penggalangan dalam berbagai forum internasional seperti DK PBB, dan mencegah internasionalisasi masalah separatisme di Indonesia.

Selain itu, dalam fora internasional, Indonesia harus konsisten untuk menyuarakan bahwa *self-determination* hanya dapat diaplikasikan pada negara dan tidak kepada masyarakat, tidak bertentangan dengan integritas wilayah, dan mengusung prinsip non-intervensi dalam domestik masalah negara tersebut. Indonesia tidak dapat menerima segala macam manuver politik-ekonomi dengan mengajukan ancaman untuk merdeka apabila suatu kepentingan tertentu tidak diluluskan atau pemisahan sebagai suatu alat tawar dan bahkan pemerasan politik atau sanksi. Strategi politik demikian adalah pelanggaran prinsip demokrasi konstitusionalisme dan hubungan antara negara-negara yang beradab.

Jalanan perpaduan antara kebijakan dalam dan luar negeri tersebut kemudian harus disinkronkan dengan posisi Indonesia dalam penerimaan hukum internasional ke dalam hukum nasional. Indonesia tidak perlu terjebak dalam dikotomi penerapan hukum internasional secara dualisme atau monisme. Indonesia dapat mempunyai jalan tengahnya sendiri dengan mengedepankan primat hukum nasional di atas hukum internasional, bukan sebaliknya. Hal ini karena lima hal:

Pertama, hukum internasional dalam berbagai kasus hanya menjadi alat sistem/masyarakat internasional untuk menggapai tujuannya dengan mengorbankan hak/kepentingan pihak lain. *Kedua*, Penerapan hukum internasional sering inkonsisten tergantung oleh siapa yang menentukan, apa isunya, dan bagaimana dampaknya terhadap sistem/masyarakat internasional. *Ketiga*, apabila primat hukum internasional bersifat universal di atas

hukum nasional maka akan terjadi benturan dengan *local wisdom* yakni keunikan, kekhasan, dan ciri suatu bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Akibatnya harmoni dan kemajuan bangsa dan suku bangsa terancam punah. *Keempat*, selain itu, bukan tidak mungkin setiap tindakan pemerintah nasional dalam mengatasi daerah separatistis, yang dibenarkan dalam UU nasional, dinilai bertentangan dengan hukum internasional dan kemudian dihukum dengan berbagai cara. Yang paling aktual adalah melalui intervensi dengan alasan kemanusiaan (*Responsibility to Protect-R2P*). *Kelima*, Kesemuanya itu pada gilirannya akan mengancam kedaulatan dan berpotensi memecah NKRI.

Melihat cermin dunia internasional yang terjadi di Ukraina saat ini, Indonesia harus mendukung tatanan dunia yang multipolar yang menghargai perbedaan cara pandang dalam menjalankan pemerintahan/negara, kemajemukan dalam mencapai proyeksi kepentingan nasional, dan tidak menginginkan adanya agresivitas, eksepsionalisme, dan unilateralisme masyarakat/sistem internasional saat ini. Dengan itu Indonesia dapat menjaga keselamatan bangsa, kedaulatan negara, integritas wilayah, dan marwah bangsa.

Pelajaran dari Ukraina membuat Indonesia harus lebih cermat dan waspada melihat dinamika hubungan internasional aktual terhadap kepentingan nasionalnya. Sebelum mengeluarkan suatu kebijakan, dalam dan luar negeri, Indonesia harus melihat berbagai aspek poleksosbudhankam secara komprehensif untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Untuk itu, mutlak diperlukan lintas koordinasi dan sinergi antar para pemangku kepentingan. Dengan demikian diharapkan dengan koordinasi dan sinergi dalam berbagai aspek tersebut Indonesia dapat memagari kedaulatan bangsa/negara dan menangkal TAHG internal dan eksternal.

Penutup

Krisis di Ukraina adalah revolusi berwarna yang dilakukan oleh sistem/masyarakat internasional untuk menggulingkan pemerintahan yang sah terpilih lewat pemilu dan menggantinya dengan pemerintahan yang pro-Barat. Krisis di Ukraina berdampak pada tatanan politik global dalam dua hal. Pertama, kekuatan politik internasi-

onal menuju sebuah perimbangan baru yang sebelumnya didominasi oleh Barat. Kedua, konsekuensinya, tatanan politik global multipolar kini mulai menemukan bentuknya. Hal itu karena Rusia yang sebelumnya terlihat terpojok dan lemah, kini atas respons anti-sistemiknya di Rusia tampak lebih asertif menghadapi Barat. Sebaliknya bagi Barat, hal itu membuat mereka bersatu padu untuk menghukum Rusia dengan memberikan sanksi atau eskalasinya di saat yang tepat.

Mengingat peran Rusia sebagai pemain global yang semakin diperhitungkan dan aliansi strategisnya dengan negara-negara Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan (BRICS), situasi ini dapat memunculkan awal/dasar pada perimbangan baru dalam tatanan politik-ekonomi global dan regional. Implikasinya, hal itu menimbulkan dua kemungkinan apakah Barat dan Rusia menahan diri untuk tidak saling mengganggu atau sebaliknya. Apabila yang terakhir dipilih maka hal itu dapat membawa konsekuensi global berupa tantangan serius terhadap sistem petro-dollar, ambruknya dollar AS, perang konvensional, atau bahkan bencana nuklir di Eropa Timur.

Terkait dengan legitimasi krisis politik di Ukraina, tidak dibenarkan dalam hubungan bangsa-bangsa yang beradab siapapun untuk mengganti rezim atau membatalkan produk kebijakan yang ditempuh secara demokratis dalam suatu negara. Tindakan tersebut yang apabila kemudian diikuti dengan kebijakan konstitusional tidak membenarkan tindakan inkonstitusional tersebut. Dengan demikian, pihak yang melakukan tekanan atau bantuan dalam tindakan inkonstitusional tersebut harus bertanggung jawab atas kerusakan sosial dan politik yang timbul darinya.

Sehubungan dengan hak untuk menentukan nasib sendiri dalam bentuk referendum, terlihat adanya *power politics* Barat dalam melihat permasalahan tersebut. Hal itu memberikan pelajaran bagi Indonesia yang secara konsisten harus mengusung prinsip non-intervensi dan menyuarakan bahwa *self-determination* hanya dapat diaplikasikan pada negara dan tidak kepada masyarakat, dan tidak bertentangan dengan integritas wilayah. Selain itu, segala

macam manuver politik-ekonomi (domestik dan global) dengan mengajukan ancaman untuk merdeka apabila suatu kepentingan tertentu tidak diluluskan atau pemisahan sebagai suatu alat tawar dan bahkan pemerasan politik atau sanksi tidak dapat diterima. Strategi politik demikian adalah pelanggaran prinsip demokrasi konstitusionalisme dan hubungan bangsa-bangsa yang beradab.

Sebagai negara kekuatan menengah, Indonesia harus lebih jeli membaca berbagai dinamika internasional saat ini menjadi kesatuan yang utuh sehingga dapat menjadi panduan dalam menentukan kebijakan nasionalnya. Dengan itu pula Indonesia dapat menjaga kedaulatan bangsa/negara, mengantisipasi TAHG, dan mengukur kemampuannya secara objektif dan rasional.

Daftar Pustaka

Buku

- Arquilla, John & David Ronfeldt. 2000. *Swarming & The Future of Conflict*. California: RAND.
- Arquilla, John & David Ronfeldt. 1993. *Cyberwar is Coming!*. California: RAND.
- Brzezinski, Zbigniew. 1997. *The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives*. Washington DC: Basic Books.
- Bull, Hedley. 1977. *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics*. New York: Columbia University Press.
- Bureau of Political-Military Affairs. 2009. *U.S. Government Counterinsurgency Guide*. Washington: Bureau of Political Military Affairs.
- Chossudovsky, Michel. 2002. *War and Globalisation*. Ottawa: Global Outlook.
- Cordesman, Anthony. 2014. *Russia and the "Color Revolution"*. Washington: CSIS.
- Cordesman, Anthony (et.al). 2010. *The Arab Israeli Military Balance, Conventional Realities and Assymetric Challanges*. Washington: CSIS.
- Engdahl, F. William. 2009. *Full Spectrum of Dominance, Totalitarian Democracy in the New World Order*. Wiesbaden: edition.engdahl.
- . 2014. *Anglo-American Oil Politics and the New World Order*. London: Pluto Press.
- Frieden, Jeffrey. 2006. *Global Capitalism: Its Falls and Rise in the Twentieth Century*. New York: W.W Norton & Company.

- Hermawan, Yulius (Ed). 2007. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jamil, Mukhsin (Ed). 2007. *Memahami Konflik*. Semarang: Wali Songo Media Center.
- Mearsheimer, John & Stephen Walt. 2010. *Dahsyatnya Lobi Israel*. Jakarta: Gramedia.
- Organski, A.F.K. & Jack Kugler. 1980. *The War Ledger*. Chicago.
- Perkins, John. 2009. *Hoodwinked*. New York: Broadway Books.
- , 2004. *Confessions of an Economic Hit Man*. San Fransisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc.
- Sujatmoko, Andrey. Tanpa Tahun. *Kemerdekaan Sebagai Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri (Right to Self-Determination) dalam Persepektif Hukum Internasional (Studi Kasus terhadap Kemerdekaan Kosovo)*.
- Tammen, Ronald, dkk. 2000. *Power Transitions: Strategies for the 21st Century*. New York: Chatham House Publishers.
- Wilson, Jeanne. 2014. *Colour Revolutions: The View From Moscow and Beijing*. Cambridge: Centre for East European Language Based on Area Studies.

Jurnal

- Adrian, Garry. 2014. "Ukraina Memanas; Beli Dollar atau Emas?." *IM Trader*, Vol. 5, Maret-April.
- Dragneva-Lewers, Rika & Katryna Wolczuk. 2013. "Russia, the Eurasian Customs Union and the EU: Cooperation, Stagnation or Rivalry?" *National Security & Defence*, No.4-5.
- Information-Analytical Bulletin of the Cabinet of Ministers of Ukraine. 2013. "Ukraine wants global free trade", 25 Oktober.
- Kamasa, Frassminggi. 2014. "Global Governance in a Globalizing World: Do Globalization and Global Governance Erode National Sovereignty?", *Opinio Juris* 14.
- , 2014. "Dari Bretton Woods ke Petro-Dollar: Analisis dan Evaluasi Kritis Sistem Moneter Internasional", *Jurnal Global Strategis*, 8(2): 233-254.
- Kubicek, Pavel. 2005. "The European Union and democratization in Ukraine", *Communist and Post-Communist Studies* 38: 272-274.
- Journal of the United Nations*. "Asia-Pacific Group (on the latest developments in Ukraine)," 2014/51, 19 Maret 2014.
- Yudiatmaja, Wahyu Eko. 2012. "Jebakan Utang Luar Negeri Bagi Beban Perekonomian dan

Pembangunan Indonesia." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan* 13(1).

Laporan dan Makalah

- Arrighi, Giovanni. 2003. "Hegemony and Anti-Systemic Movements", Paper Prepared for the *International Seminar REGGEN (Global Economic Network and Sustainable Development) 2003, Globalization Constraints and Regionalization Processes*, Rio de Janeiro. 18-22 Agustus.
- Constitution of Ukraine. Chapter III, Article 73 & Chapter X, Article 134.
- European Union External Action. 2014. "Joint Statement Geneva Statement on Ukraine." Geneva, 17 April.
- Kamasa, Frassminggi. 2014. "Dinamika Kawasan Eropa Tengah dan Timur dan Kepentingan Indonesia." Workshop *Perdamaian dan Hubungan Internasional di Amerika dan Eropa*. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 5 September.
- Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. 2014. "Comparative Data on Protection of Russian Ethnic Minority's Right in Ukraine and Ukrainian Ethnic Minority's Rights in Russia." 14 Maret.
- The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. 2014. "Statement by the Russian Ministry of Foreign Affairs regarding accusations of Russia's violation of its obligation under the Budapest Memorandum of 5 December 1994." 1 April.

Surat Kabar dan Website

- Ames, Mark. 2014. "Pierre Omidyar co-founded Ukraine revolution groups with US government, document show." *Pando Daily*. <http://pando.com/2014/02/28/pierre-omidyar-co-funded-ukraine-revolution-groups-with-us-government-documents-show/>.
- Bryant, Nick. 2014. "Ukraine's Yanukovich asked for troops, Russia tells UN." *BBC*. <http://www.bbc.com/news/world-europe-26427848>.
- Burns, Robert. "NATO official: Russia now an adversary". <http://news.yahoo.com/nato-official-russia-now-adversary-150211090--politics.html>.
- Charskiy, Vyacheslav. 2014. "Gerakan Maidan: Nasionalis, atau Pemberontak Ukraina?" *RBTH Indonesia*, http://indonesia.rbth.com/politics/2014/05/05/gerakan_maidan_nasionalis_atau_pemberontak_ukraina_23731.html.

- China Daily*. "Ukraine detains 12 former riot police in deaths of protesters", http://www.chinadaily.com.cn/world/2014-04/04/content_17405888.htm.
- Engdahl, William. 2014. "Ukraine Protests Carefully Orchestrated: The Role of CANVAS, US-Financed "Color Revolution Training Group." *Global Research*. <http://www.globalresearch.ca/ukraine-protests-carefully-orchestrated-the-role-of-canvas-us-financed-color-revolution-training-group/5369906>.
- Faruqi, Shad Saleem. 2014. "Double Standards on Krimea." *The Star*, <http://www.thestar.com.my/Opinion/Columnists/Reflecting-On-The-Law/Profile/Articles/2014/04/03/Double-standards-on-Krimea/>.
- Fornichev, Oleg. 2014. "Putin: Kami Tidak Ingin Memecah Ukraina." *RBTH Indonesia*, http://indonesia.rbth.com/politics/2014/03/19/putin_kami_tidak_ingin_memecah_ukraina_23425.html.
- Global Research News*. 2014. "American Conquest by Subversion: Victoria Nuland's Admits Washington Has Spent \$5 Billion to "Subvert Ukraine." <http://www.globalresearch.ca/american-conquest-by-subversion-victoria-nulands-admits-washington-has-spent-5-billion-to-subvert-ukraine/5367782>.
- Global Times*. "West-Russia rivalry bleeds Ukraine dry." <http://backup.globaltimes.cn/NEWS/tabid/99/ID/843608/West-Russia-rivalry-bleeds-Ukraine-dry.aspx>.
- Gerstenfeld, Manfred. 2014. "Why Israel should monitor the Ukraine conflict closely." *The Jerusalem Post*. <http://www.jpost.com/Opinion/Op-Ed-Contributors/Why-Israel-should-monitor-the-Ukraine-conflict-closely-352559>.
- Hadar, Ivan. "Warisan Utang 2014." *Koran Sindo*. <http://nasional.sindonews.com/read/866412/18/warisan-utang-2014>.
- Hall, John. 2014. "Estonian Foreign Ministry confirms authenticity of leaked phone call discussing how Kiev snipers who shot protesters were possibly hired by Ukraine's new leaders." *Daily Mail*.
- Harress, Christopher. 2014. "Poland and Lithuania Wary of Kaliningrad Being Base of Next Move From Russia." *International Business Times*. <http://www.ibtimes.com/poland-lithuania-wary-kaliningrad-being-base-next-move-russia-1561963>.
- Hudson, Michael. 2014. "The New Cold War's Ukraine Gambit", *Strategic Culture*, <http://www.strategic-culture.org/news/2014/05/21/the-new-cold-war-ukraine-gambit.html>.
- Interfax-Ukraine*. 2014. "US Providing Ukraine with financial, technical and non-lethal aid before presidential elections-Nuland." <http://en.interfax.com.ua/news/general/204163.html>.
- . 2014. "Death toll of Ukraine conflict exceeds 3,500-UN." <http://en.interfax.com.ua/news/general/225196.html>.
- ITAR-TASS News Agency*. 2014. "Russia stops gas supplies to Ukraine, transit to EU totals 185 million cu m daily-Prodan." <http://en.itar-tass.com/economy/736286>.
- Juwana, Hikmahanto. 2014. "Krimea, Menjaga agar Tak Jadi Perang Panas." *Koran Sindo*. <http://law.ui.ac.id/v2/buletin/media/50-Krimea-menjaga-agar-tak-jadi-perang-panas>.
- Kementerian Luar Negeri RI. 2014. "Indonesia Serukan Sikap Menahan Diri dan Penyelesaian Damai Krisis Ukraina", <http://kemlu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=6832&l=id>.
- Lally, Kathy. 2014. "Ousted Ukraine president warns of civil war, criticizes U.S. for aiding current government." *Washington Post*. http://www.washingtonpost.com/world/ousted-ukraine-president-warns-of-civil-war-criticizes-us-for-aiding-current-government/2014/03/11/13fd0482-a907-11e3-b61e-8051b8b52d06_story.html.
- Liphshiz, Cnaan. 2014. "In Kiev, an Israeli army vet led a street-fighting unit" *JTA*, <http://www.jta.org/2014/02/28/news-opinion/world/in-kiev-an-israeli-militia-commander-fights-in-the-streets-and-saves-lives#ixzz2uvYcMBEL>.
- Lossan, Alexey. 2014. "Putin: Rusia Siap Akui Pemilu Ukraina" *RBTH Indonesia*, http://indonesia.rbth.com/politics/2014/05/28/putin_rusia_siap_akui_pemilu_ukraina_23923.html.
- Macdonald, Alastair. 2014. "Putin aide warns U.S. on Ukraine, says Russia could act." *Reuters*. <http://www.reuters.com/article/2014/02/06/us-ukraine-russia-glazyev-idUSBREA150X720140206>.
- Mambor, Victor. 2014. "Noam Chomsky: Kasus Papua Barat itu "Major Scandal." *Papua Post*. <http://papuapost.com/2013/12/noam-chomsky-kasus-papua-barat-itu-major-scandal/>.
- Marcus, Jonathan. 2014. "Ukraine Crisis: Transcript of leaked Nuland-Pyatt Call." *BBC*, <http://www.bbc.com/news/world-europe-26079957>.
- Pogarska, Olga & Edilberto Segura. 2014. "Ukraine-Economic Situation-April 2014." *Unian Information Agency*. <http://www.unian.info/politics/908836-ukraine-economic-situation-april-2014.html>.

- Press TV. "Kiev snipers hired by Maidan coalition: Leaked call." <http://www.presstv.com/detail/2014/03/07/353636/maidan-coalition-hired-kiev-snipers/>.
- Putin, Vladimir. 2014. "Russia in a Changing World: Stable Priorities and New Opportunities." <http://eng.kremlin.ru/news/4145>.
- Rapoza, Kenneth. 2014. "Ukraine Welcomes I M F Austerity Regime." *Forbes*. <http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2014/03/28/ukraine-welcomes-imf-austerity-regime/>.
- RT. "Kiev allows police to use firearms, demands armed rioters lay down weapons". <http://rt.com/news/ukraine-kiev-firearms-weapons-police-934/>.
- , "5 Referendums that the West has not taken issue with." <http://rt.com/news/referendums-ukraine-west-relations-782/>.
- , "Who will threatened sanctions hit most? US-EU Russia trade in numbers." <http://rt.com/business/us-eu-russia-sanctions-590/>.
- Samuel, Raymond. 2014. "Kegelapan' Menghantui Ukraina." *Berdikari Online*. <http://www.berdikarionline.com/dunia-bergerak/20140302/kegelapan-menghantui-ukraina.html#ixzz36rMZ59hc>.
- Sinha, Nidhi. 2014. "Ukraine seeks way between EU and Russia." *Global Times*. <http://www.globaltimes.cn/content/842988.shtml>.
- The Associated Press & Reuters*. 2014. "Everything you need to know about Krimea" *Haaretz*. <http://www.haaretz.com/news/world/1.577286>.
- The Jakarta Post*. "There have been efforts to move to an independent Asia. Noam Chomsky interviewed by Proditia Sabarini." <http://www.thejakartapost.com/news/2014/03/19/there-have-been-efforts-move-independent-asia.html>.
- The Times of Israel*. "Yanukovich blames fascists, West for Ukraine Chaos." <http://www.timesofisrael.com/yanukovich-blames-fascists-west-for-ukraine-chaos/>.
- UNHCR. 2014. "Sharp Rise in Ukrainian displacement, with more than 50,000 internally displaced." <http://www.unhcr.org/53ad57099.html>.
- United States Committee on Foreign Relations 2014. "Business Meeting and Implications of the Crisis in Ukraine Hearing." <http://www.foreign.senate.gov/hearings/business-meeting-and-implications-of-the-crisis-in-ukraine-hearing>.
- The Global Review*. "NATO: Gencatan Senjata di Ukraina Baru Sebatas Teori." http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=16304&type=103#.VCoiYVfuyso.
- Westcott, Lucy. 2014. "BRICS Conference Plots a Challenge to Western Economic Domination." *Newsweek*. <http://www.newsweek.com/brics-conference-plots-challenge-western-economic-domination-259093>.
- Zakaria, Fareed. 2012. "Israel has become Mideast superpower." *Toronto Star*. 25 September.